



KATA PENGANTAR

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Kabupaten / Kota (daerah) menyusun profil perkembangan kependudukan berskala Kabupaten Kota.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Kota Bima pada tahun 2013. Sumber utama data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima adalah data kependudukan hasil registrasi penduduk yang tersimpan dalam database operasional SIAK status 31 Desember 2013.

Selanjutnya mengingat data kependudukan merupakan data yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk, maka dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini digunakan pula data kependudukan dari lintas sektor terkait.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi penduduk, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Bima pada khususnya dan penduduk Indonesia secara keseluruhan pada umumnya.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2013 ini tentu terdapat berbagai kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan sebagai masukan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun berikutnya.

Kota Bima, 2014

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bima**

**Drs. H. HAJAIRIN MS.
NIP. 19670311 199303 2 013**



WALIKOTA BIMA

H. QURAI H. ABIDIN



WAKIL WALIKOTA BIMA

H. ARAHMAN H. ABIDIN



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BIMA

Drs H. HAJAIRIN MS.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	(ii)
DAFTAR ISI	(iii)
DAFTAR TABEL	(vi)
DAFTAR GAMBAR	(xxiii)
DAFTAR LAMPIRAN	(xxv)
BAB I PENDAHULUAN	(1)
A. Latar Belakang	(2)
B. Tujuan	(2)
C. Ruang Lingkup	(3)
D. Konsep dan Definisi	(3)
D. Sumber Data	(7)
E. Sistematika Penulisan	(8)
BAB II GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DAERAH	(9)
A. Letak Geografis	(9)
B. Visi	(12)
C. Misi	(13)
D. Administrasi Pemerintahan Daerah	(14)
F. Sosial Budaya dan Agama	(18)
G. Transportasi dan Komunikasi	(19)
BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KUANTITAS PENDUDUK	(20)
A. Komposisi Penduduk Menurut Demografi	(20)
1. Jumlah Penduduk	(20)
2. Jumlah Penduduk Umur dan Jenis Kelamin	(23)
3. Rasio Kepadatan Penduduk	(29)
4. Angka Pertumbuhan Penduduk	(31)
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	(34)
1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	(34)
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	(36)
3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan	(38)
4. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	(40)
C. Keluarga	(47)
1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	(47)
2. Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	(49)
3. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin	(51)
4. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin Kelahiran	(52)
5. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan	(53)
6. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja	(55)



	D. Kelahiran (Fertilitas)	(56)
	1. Jumlah Kelahiran	(56)
	2. Angka Kelahiran Kasar	(59)
	E. Kematian (Mortalitas)	(60)
	1. Jumlah Kematian	(61)
	2. Angka Kematian Kasar	(63)
BAB IV	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KUALITAS PENDUDUK	(64)
	A. Kesehatan	(64)
	1. Fertilitas	(64)
	2. Mortalitas	(67)
	B. Pendidikan	(71)
	1. Angka Melek Huruf	(71)
	2. Angka Partisipasi Murni	(72)
	3. Angka Partisipasi Kasar	(75)
	4. Angka Pendidikan yang ditamatkan	(76)
	C. Ekonomi	(78)
	1. Tenaga Kerja	(78)
	2. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	(83)
	3. Pengangguran (Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja) Dan Tingkat Pengangguran	(88)
	D. Sosial	(92)
	1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	(92)
	2. Penduduk Miskin	(94)
BAB V	MOBILITAS PENDUDUK	(97)
BAB VI	KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	(101)
	A. Kepemilikan Kartu Keluarga	(101)
	B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	(103)
	C. Kepemilikan Akta	(104)
	D. Pengakuan, Pengesahan dan pengangkatan Anak dan Peristiwa Penting Lainnya.	(108)
BAB VII	PENUTUP	(109)

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 2.1.	Keadaan Geografi Kota Bima Tahun 2013	(10)
Tabel. 2.2.	Pembagian Wilayah Adminstrasi Kota Bima Tahun 2013	(14)
Tabel. 2.3.	Keadaan Sosial Budaya dan Agama di Kota Bima	(17)
Tabel. 3.1.	Jumlah Penduduk Kota Bima Tiap Kecamatan/Kelurahan Tahun 2013	(21)
Tabel. 3.2.	Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2013	(24)
Tabel. 3.3.	Tabel Jumlah Penduduk Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2013	(25)
Tabel. 3.4.	Tabel Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2013	(29)
Tabel. 3.5.	Tabel Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Bima Tahun 2013	(30)
Tabel. 3.6.	Tabel Jumlah Angka Pertumbuhan Penduduk Kota Bima Tahun 2010-2013	(32)
Tabel. 3.7.	Tabel Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir tahun 2013	(35)
Tabel. 3.8.	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	(37)
Tabel. 3.9.	Tabel Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan	(38)
Tabel. 3.10.	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin	(40)
Tabel. 3.11.	Tabel Angka Perkawinan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2013	(42)
Tabel. 3.12.	Tabel Angka Perkawinan Menurut Umur Tahun 2013	(43)
Tabel. 3.13.	Tabel Angka Perceraian Kasar Menurut Kecamatan Di Kota Bima	(45)
Tabel. 3.14.	Tabel Angka Perceraian Umum Menurut Kecamatan Di Kota Bima	(46)
Tabel. 3.15.	Tabel Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Bima Tahun 2012	(47)
Tabel. 3.16.	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Kota Bima Tahun 2013	(49)
Tabel. 3.17.	Tabel Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Bima	(50)
Tabel. 3.18.	Tabel Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin di Kota Bima	(51)
Tabel. 3.19.	Tabel Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja di Kota Bima Tahun 2013	(53)
Tabel. 3.20.	Tabel Jumlah Kelahiran Hidup Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2013	(57)
Tabel. 3.21.	Tabel Jumlah Kematian Menurut Wilayah Kecamatan Dan Jenis Kelamin Kota Bima Tahun 2013	(61)
Tabel. 3.22.	Tabel Angka Kematian Kasar Kota Bima Tahun 2013	(62)
Tabel. 4.1.	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Kota Bima Tahun 2013	(65)
Tabel. 4.2.	Tabel Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ration/CWR)	



	Kota Bima Tahun 2013	(67)
Tabel. 4.3.	Tabel Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2013	(69)
Tabel. 4.4.	Tabel Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate-MMR) Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kota Bima Tahun 2012	(70)
Tabel. 4.5.	Tabel Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s/d 2013 Kota Bima	(72)
Tabel. 4.6.	Tabel Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2008 s.d Tahun 2013 Kota Bima	(74)
Tabel. 4.7.	Tabel Angka Partisipasi Murni Tahun 2013 Menurut Kecamatan	(75)
Tabel. 4.8.	Tabel Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2008 s.d Tahun 2013 Kota Bima	(76)
Tabel. 4.9.	Tabel Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2008 s.d Tahun 2013	(78)
Tabel. 4.10.	Tabel Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Bima Tahun 2013	(80)
Tabel. 4.11.	Tabel Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2013	(82)
Tabel. 4.12.	Tabel Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2013	(83)
Tabel. 4.13.	Tabel Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2013	(85)
Tabel. 4.14.	Tabel Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja, Angka Penyerapan Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2013	(86)
Tabel. 4.15.	Tabel Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Bima Tahun 2013	(87)
Tabel. 4.16.	Tabel Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja, Angka Pengangguran Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Kota Bima Tahun 2013	(89)
Tabel. 4.17.	Tabel Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja, Angka Pengangguran Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Bima tahun 2013	(91)
Tabel.4.18.	Tabel data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Tahun 2013 di Kota Bima	(93)
Tabel.4.19.	Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Kota Bima Tahun 2010 s/d Tahun 2013	(95)
Tabel. 4.20.	Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bima	(96)
Tabel. 5.1.	Tabel Jumlah Migrasi Masuk, Jumlah Migrasi Keluar, Angka Migrasi Masuk, Angka Migrasi Keluar dan Angka Migrasi Neto Menurut Kecamatan Kota Bima Tahun 2013	(98)



Tabel. 5.2.	Tabel Angka Migrasi Masuk, Angka Migrasi Keluar dan Angka Migrasi Neto Menurut Kecamatan Kota Bima Tahun 2013	(99)
Tabel. 6.1.	Tabel Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Bima Tahun 2013	(102)
Tabel. 6.2.	Tabel Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bima Tahun 2013	(103)
Tabel. 6.3.	Tabel Jumlah Pencatatan Kelahiran Menurut Wilayah Kecamatan Kota Bima Tahun 2013	(105)
Tabel. 6.5.	Tabel Jumlah Pencatatan Perkawinan Kota Bima Tahun 2013	(106)
Tabel. 6.6.	Tabel Jumlah Pencatatan Kematian Kota Bima Tahun 2013	(103)

**DAFTAR GAMBAR/GRAFIK**

Gambar 1.	Peta Wilayah Kota Bima	(9)
Grafik 1.	Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2013	(23)
Grafik 2.	Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013	(27)
Grafik 3.	Jumlah Penduduk Kota Bima Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013	(36)
Grafik 4.	Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Bima Tahun 2013	(38)
Grafik 5.	Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Kota Bima Tahun 2013	(39)

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.	Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2013	(8)
Grafik 2.	Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013	(27)
Grafik 3.	Jumlah Penduduk Kota Bima Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013	(36)
Grafik 4.	Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Bima Tahun 2013	(38)
Grafik 5.	Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Kota Bima Tahun 2013	(39)
Grafik 6.	Jumlah Kelahiran Kota Bima Tahun 2013	(36)



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka keadaan yang demikian itu menuntut pengembangan sistem administrasi kependudukan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 21 ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban pengelolaan Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan dibutuhkan sebagai data informasi pertambahan dan perkembangan penduduk serta persebarannya guna perencanaan pembangunan di daerah.

Data Informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan yang objektif dalam menetapkan suatu kebijakan dalam perencanaan dan strategi pembangunan kedepan serta evaluasi dimasa lalu. Pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat membawa dampak dari adanya pertambahan penduduk, untuk diketahui keadaan penduduk dan persebaran dengan berbagai kualitas yang dimiliki diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dan langkah – langkah strategis yang jelas dan teratur dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran.

Penyusunan pelaksanaan kebijakan dan program – program pembangunan yang baik memerlukan dukungan dan kerja sama yang baik pula antara kecamatan yang ada di Kota Bima sehingga ketersediaan data yang lebih akurat, terkini/tepat waktu, relevan, komprehensif, konsisten dan berkesinambungan. Hal ini juga berlaku untuk data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan kependudukan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan pendayagunaan data SIAK akan dapat dilakukan secara optimal, akurat dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pembangunan daerah.



Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek – aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bima dalam mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran. Kesejahteraan masyarakat menjadi latar belakang dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perkembangan penduduk di Kota Bima baik perkembangan masa lampau maupun perkembangan kedepannya, gambaran secara statistik menyangkut variabel jumlah penduduk, struktur , umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan dan kematian sebagai sumber data yang disusun setiap tahun sehingga dapat dicapai sasaran yang diinginkan dari setiap kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.

Jumlah penduduk disuatu daerah merupakan potensi pembangunan yang besar jika berkualitas, sebaliknya jika suatu wilayah memiliki jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi kualitasnya rendah maka justru akan menjadi beban bagi proses pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun tujuan spesifik pada penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini sebagai berikut :

1. Untuk mereview dan memberikan gambaran tentang perkembangan kependudukan di Kota Bima.



2. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap situasi kependudukan pada tingkat Kota dan Kecamatan untuk kemudian dipergunakan sebagai penetapan kebijakan dan program.
3. Memberi saran dan rekomendasi dalam rangka upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan komitmen para perencana dan pelaku pembangunan tentang isu dan persoalan kependudukan.

C. Ruang Lingkup

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. KONSEP DAN DEFINISI

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi,sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi andministrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain .
4. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat



- bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang struktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 6. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
 7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai
 8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas Administrasi Daerah Tingkat II.
 9. **Profil** adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal – hal tertentu
 10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan
 11. **Penyebaran Penduduk** adalah upaya mengubah sebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 12. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
 13. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana
 14. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta



status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

15. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16. **Nomor Induk Kependudukan** adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
18. **Data** adalah fakta yang ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam bentuk media.
19. **Sumber data** adalah segala sesuatu tentang fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau rekam kedalam berbagai bentuk media oleh instansi / lembaga.
20. **Fertilitas** diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam jangka waktu satu generasi atau selama masa subur.
21. **Kematian atau Mortalitas** adalah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk
22. **Angka Kelahiran Total** adalah rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan masa reproduksinya.
23. **Ratio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki – laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu.
24. **Perkembangan Kependudukan** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap



pembangunan dan lingkungan hidup

25. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
26. **Mobilitas penduduk permanen (Migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (Migran Internal) atau batas politik/ Negara (Migrant Internasional).
27. **Mobilitas penduduk non permanen** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative.
28. **Migrasi Kembali** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal didaerah yang berbeda.
29. **Migrasi seumur hidup** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya.
30. **Migrasi risen** adalah bentuk migrasi melewati batas administrasi (desa/Kec/Kab/Provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
31. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
32. **Penduduk usia kerja angkatan kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
33. **Angka partisipasi angkatan kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
34. **Angkatan Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
35. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan



- penduduk usia 64 tahun keatas.
36. **Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda – tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
 37. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda – tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
 38. **Angka Kematian bayi/ IMR** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9 – 11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
 39. **Angka Kematian Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
 40. **Angka partisipasi total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu 7 – 12, 13 – 15, 16 – 18 dan 19 – 24 tahun.
 41. **Angka partisipasi murni** adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7 – 12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13 – 15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16 – 18 tahun dan jumlah peserta didik PTN / PTS usia 19 – 24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing – masing jenjang pendidikan.
 42. **Angka partisipasi kasar** adalah persentase jumlah peserta didik SD, jumlah peserta didik SLTP, jumlah peserta didik SLTA, jumlah peserta didik PTN / PTS dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia masing – masing jenjang pendidikan (SD usia 7-12 tahun, SLTP usia 13 – 15 tahun, SLTA usia 16-18 tahun, PTN/PTS usia 19 – 24 tahun).

D. SUMBER DATA

Sumber Data yang digunakan di dalam penulisan ini merupakan data yang di ambil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang berhubungan dengan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2013 disajikan atas VII (tujuh) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum dan Potensi Daerah
BAB III	:	Perkembangan Penduduk di Bidang Kuantitas Penduduk
BAB IV	:	Perkembangan Penduduk di Bidang Kualitas Penduduk
BAB V	:	Mobilitas Penduduk
BAB VI	:	Kepemilikan Dokumen Kependudukan
BAB VII	:	Penutup

Dalam segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Profil Kependudukan Kota Bima Tahun 2013 selalu dilakukan perbaikan baik dari segi materi, analisis, maupun bentuk tampilan fisiknya disesuaikan dengan pedoman pusat yang mengacu pada indikator penunjang demi tercapainya informasi kependudukan yang akurat dan up to date.



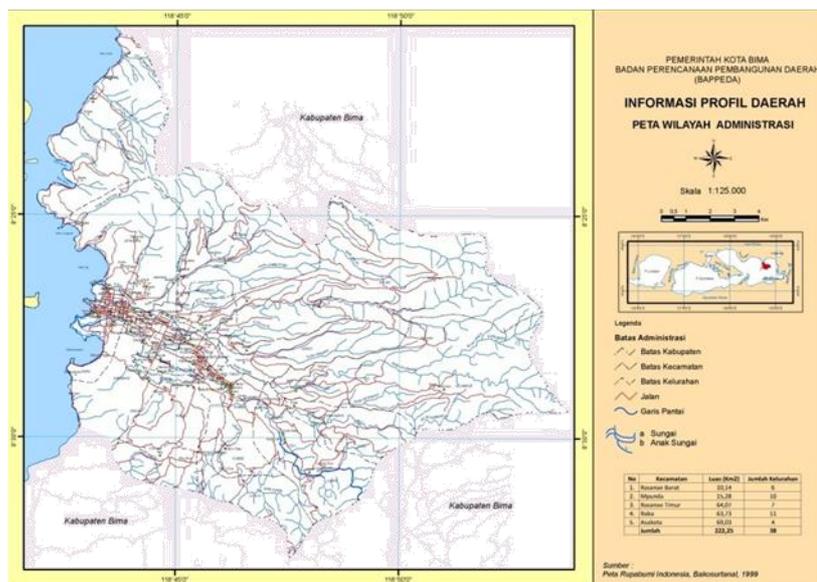
BAB II GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DAERAH

A. Letak Geografis

Kota Bima merupakan salah satu Kota dari 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 222,25 km². Secara geografis letak Kota Bima berada pada 118°41' – 118°48' Bujur Timur dan 8°30'-8°20' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
Sebelah Timur	:	Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
Sebelah Barat	:	Teluk Bima.

Peta Kota Bima



Gambar.1 : Peta Wilayah Kota Bima

Berdasarkan data statistik dari lembaga Meteorologi dan Geofisika wilayah Bima, temperatur maksimum sepanjang tahun sekitar 36,8°C dan



temperatur minimum sekitar 20,9°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Juli. Sebagai daerah tropis, Kota Bima mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu sekitar 77,8 persen.

Faktor geografi yang dimaksud antara lain mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula menghambat. Tersedianya sumber daya alam (SDA) merupakan faktor yang menunjang pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.

Wilayah Kota Bima sebagian besar tanahnya berada pada kemiringan 0 -2% (datar) seluas 9.442 Ha, kemiringan 2-15% (bergelombang) dengan luas 5.292 Ha, kemiringan 15-40% (curam) 4.534 Ha, dan di atas 40 % (sangat curam) 2.957 yaitu kurang lebih 13.30 % dari luas wilayah, sedangkan kemiringan tanah antara 2-15% kurang lebih 23.81 % dari luas wilayah.

Sumber daya Alam baik yang terkandung di daratan, sungai, maupun dilaut merupakan potensi ekonomi yang besar. Pengelolaan dan peningkatan sumber daya secara efisien dan efektif akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kependudukan.

Di Kota Bima terdapat berbagai sumber daya alam (SDA), diantaranya yang menjadi andalan adalah sebagai berikut :

- Pertanian
- Pertambangan/Galian dan Perdagangan.
- Wisata Pantai dan Wisata Alam



Rencana tata ruang Kota Bima yang berwawasan lingkungan harus dijadikan pedoman terpadu Pembangunan agar tatanan lingkungan lingkup dan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna, berhasil guna secara berkelanjutan. Berhubungan dengan rencana tata ruang tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perlu diperhatikan hal-hal antara lain :

- Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih fungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun;
- Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Tabel.2.1
Keadaan Geografi Kota Bima Tahun 2013

No	Variabel	Jumlah
1	Sumber Daya Alam andalan	- Pertanian
		- Perdagangan
		- Pertambangan / Galian
		- Wisata Pantai / Wisata Alam
2	Keadaan Alam	
	- Musim Kemarau (bulan)	8 Bulan
	- Musim Hujan (bulan)	4 Bulan
	- Curah Hujan (mm)	77,7 mm

Sumber : Stasiun Meteorologi M.Salahuddin Bima dan Kota Bima Dalam Angka 2009/2010.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh



terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi Perkembangan kependudukan.

Musim kemarau di Kota Bima biasanya pada bulan April sampai bulan Nopember, sedangkan musim hujan terjadi bulan Desember sampai bulan Maret, dan curah hujan rata-rata adalah 77,7 mm , curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 281 mm, dan terendah terjadi pada bulan Juni s/d Juli yaitu sebesar 0,9 mm.

B. Visi

Perubahan parradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan, agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Hal tersebut memerlukan suatu kerangka pemikiran upaya yang terstruktur untuk memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) memperbaiki kinerja sektor publik dan mengobati praktek administrasi yang tidak sehat.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan administrasi kependudukan yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi dan visi tidak hanya penting pada waktu berkarya, tetapi juga pada kehidupan berorganisasi itu selanjutnya yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa.

Pengertian Visi adalah suatu pandangan yang jauh kedepan kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten,



eksis, antisipatif, inovatif serta produktif atau suatu gambaran tentang keadaan di masa depan berisikan cita dan citra yang ingin dicapai.

Visi Pemerintah Daerah Kota Bima, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2013 – 2018, yang hendak dicapai adalah :

"TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA".

C. Misi

Pimpinan suatu organisasi harus memastikan agar visi sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh unsur organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program – program serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka misi Pemerintah Kota Bima adalah :



- Misi Pertama** : “Membentuk manusia yang beriman melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal”.
- Misi Kedua** : “Menciptakan manusia yang maju melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.
- Misi Ketiga** : “Mewujudkan masyarakat yang adil melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.
- Misi Keempat** : “Menjadikan masyarakat sejahtera berbasis pembangunan ekonomi lokal dengan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai yang diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional”.

D. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 Pemerintah Daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan Kepala Daerah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayah. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan



kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bima
Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	RasanaE Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. Nae	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
		Jumlah I	
2	RasanaE Timur	1. Kel. Kumbe	1,52
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. O'i Fo'o	9,2
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
Jumlah II			64,07
3	Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	22,18
		3. Kel. Jatibaru	19,6
		4. Kel. Kolo	26,49
Jumlah III			68,27
4	Mpunda	1. Kel. SambinaE	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
Jumlah IV			15,28



5	Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. PenanaE	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
Jumlah V			62,99
Jumlah I+II+III+IV+V			220,75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Kota Bima sebagai satu wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan disegala bidang, termasuk bidang kependudukan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan kependudukan di Kota Bima tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan Kota Bima.

Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kependudukan di Kota Bima harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah Kota Bima, untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kota Bima terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan terbagi dalam 38 (tiga puluh delapan) kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 222,25 Km² (tabel 2.2)



E. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagai mana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar ada di sektor Jasa Kemasyarakatan dan lainnya sebesar 15.688 Orang (27,95%) kemudian di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebanyak 13.101 Orang (23,34%), sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 8.908 orang (15,87%), di sektor Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi sebanyak 7.948 orang (14,16%), sektor Industri Pengolahan sebesar 5.164 orang (9,20%), sektor Bangunan sebanyak 2.610 orang (4,65%), sektor Pertambangan dan Penggalian sebanyak 1.269 orang (2,26%), di sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan sebanyak 836 orang (1,49%) dan sektor Listrik, Gas dan Air sebanyak 606 orang (1,08%).

Jumlah Koperasi yang sudah berbadan hukum di Kota Bima sebanyak 133 buah dengan rincian KUD 3 (tiga) buah, Koperasi Pegawai Negeri/PKPN 21 buah, jenis koperasi lainnya 109 buah.



F. Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang masih sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat adalah masih menghormati mereka yang lebih tua darinya, rasa tenggang rasa, masih patuh pada orang yang sangat dihormati dan tidak mudah diprovokasi.

Tabel.2.3
Keadaan Sosial Budaya dan Agama di Kota Bima
Tahun 2013

No	Variabel	Jumlah	No	Variabel	Jumlah
1	Sosial Budaya dan Agama			- Gereja	4
	a. Keagamaan :			- Pura	3
	- Islam	135.571			
	- Protestan	1.670		c. Kesehatan :	
	- Katolik	928		- Rumah Sakit	1 buah
	- Hindu	494		- Puskesmas	5 Unit
	- Budha	68		- Puskesmas Pembantu	16 Unit
	- Konghucu	0		- Puskesmas Keliling	6
	b. Tempat Ibadah			- Polindes	26
	- Mesjid	122		- Posyandu	148
	- Musholla	132		- Laboratorium Klinik	3
	- Langgar/Surau	70			

a



Keadaan sosial budaya dan keagamaan di Kota Bima dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 135.571 orang (97,72%), Protestan sebanyak 1.670 orang (1,20%), Katholik 928 orang (0,67%), Hindu sebanyak 494 orang (0,36%) dan Budha sebanyak 68 orang (0,05%). Untuk mengamalkan ibadahnya pemeluk agama tersebut didukung oleh 122 Mesjid, 132 Musola, 70 Langgar/Surau, 4 Gereja, dan 3 Pura.

Keadaan kesehatan masyarakat di Kota Bima dapat digambarkan bahwa gizi masyarakat pada umumnya bervariasi yaitu ada yang baik, kurang baik atau buruk dengan rincian 75% baik, 25% kurang, dan 0% buruk dengan angka harapan hidup 55 tahun, yang didukung oleh puskesmas induk sebanyak 5 buah, puskesmas pembantu 16 buah, puskesmas keliling 6 buah, polindes 26 buah, posyandu 148 buah dan rumah sakit sebanyak 1 buah serta laboratorium klinik 3 buah. Jumlah puskesmas terhadap kecamatan adalah 100%, bila setiap kecamatan diharuskan memiliki 1 puskesmas, maka tidak ada Kecamatan di wilayah Kota Bima yang belum memiliki puskesmas.

G. Transportasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Transportasi merupakan alat angkut baik transportasi darat (bus, mobil pribadi, sepeda motor, sepeda dan lain-lain) dan transportasi perairan (Kapal laut, motor boat, perahu dan lain-lain) dan transportasi udara, sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai perkotaan, daerah perbatasan sampai daerah terpencil.



BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KUANTITAS PENDUDUK

A. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT DEMOGRAFI

1. Jumlah Penduduk

Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/kota. Kota Bima dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi jika tidak serius ditangani akan menjadi masalah yang krusial, apalagi jika jumlah ini dikaitkan dengan luas wilayah, maka permasalahan kepadatan penduduk di Kota Bima sangat riskan. Karena semakin padatnya suatu wilayah, maka akan berakibat tidak terpenuhinya fasilitas umum, padatnya daerah pemukiman dan timbulnya masalah sosial lainnya. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bima di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi.

Pada dekade tujuh puluhan hampir setiap daerah menghadapi masalah yang sama yaitu besarnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta masalah tidak meratanya penduduk di setiap daerah. Terutama antara lain daerah pedesaan dan perkotaan. Masalah jumlah penduduk perlu diperhatikan karena penduduk sebagai sumber daya ekonomi, selain sebagai modal dasar pembangunan, juga merupakan objek bagi pembangunan.



Tabel. 3.1
Jumlah Penduduk Kota Bima Tiap Kecamatan Tahun 2013

NO	KELURAHAN/ KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	PARUGA	3.010	3.009	6.019
2	NAE	2.396	2.445	4.841
3	SARAE	2.878	2.913	5.791
4	TANJUNG	3.677	3.493	7.170
5	PANE	1.464	1.610	3.074
6	DARA	3.783	3.608	7.391
	RASANA E BARAT	17.208	17.078	34.286
1	KUMBE	2.904	2.874	5.778
2	LAMPE	711	735	1.446
3	DODU	1.519	1.485	3.004
4	NUNGGGA	1.208	1.156	2.364
5	KODO	1.048	1.102	2.150
6	OI FOO	872	819	1.691
7	LELAMASE	965	968	1.933
	RASANA E TIMUR	9.227	9.139	18.366
1	MELAYU	3.586	3.587	7.173
2	JATIWANGI	5.098	4.933	10.031
3	JATIBARU	4.944	4.809	9.753
4	KOLO	2.757	2.678	5.435
	ASAKOTA	16.385	16.007	32.392
1	PENARAGA	2.590	2.697	5.287
2	RONTU	1.553	1.556	3.109
3	PENANA E	2.044	2.004	4.048
4	KENDO	749	740	1.489
5	NTOBO	1.867	1.830	3.697
6	NITU	725	691	1.416
7	RABANGODU SELATAN	1.908	1.959	3.867
8	RABADOMPU TIMUR	1.888	1.935	3.823
9	RITE	1.112	1.078	2.190
10	RABADOMPU BARAT	2.591	2.769	5.360
11	RABANGODU UTARA	2.633	2.622	5.255
	RABA	19.660	19.881	39.541
1	MONGGONAO	2.340	2.349	4.689
2	SADIA	1.889	1.926	3.815
3	SANTI	1.161	1.192	2.353
4	SAMBINA E	1.334	1.291	2.625
5	PENATOI	2.342	2.485	4.827
6	LEWIRATO	1.065	1.033	2.098
7	MANDE	1.309	1.297	2.606
8	PANGGI	1.416	1.443	2.859
9	MANGGEMACI	1.941	1.966	3.907
10	MATAKANDO	1.232	1.224	2.456
	MPUNDA	16.029	16.206	32.235
	KOTA BIMA	78.509	78.311	156.820

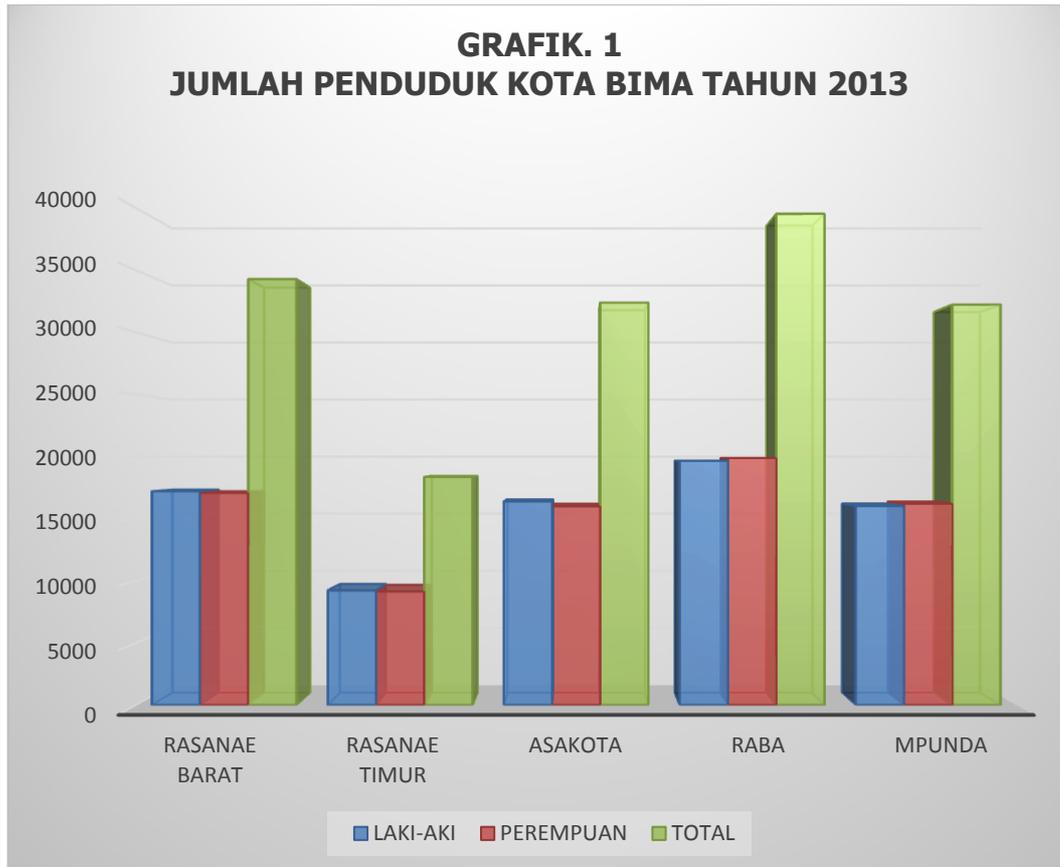
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Jumlah penduduk 156.820 jiwa yang terdiri dari 78.509 laki-laki dan 78.311 perempuan. Penduduk Kota Bima tersebar di 5 (Lima) Kecamatan. Distribusi penduduk di tiap kelurahan dan kecamatan dapat di lihat pada tabel 3.1.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Mpunda mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 39.541 atau sekitar 25,21%. Hal ini disebabkan karena wilayah kecamatan Raba merupakan daerah pusat pemerintahan. Pendatang yang datang dari berbagai daerah menetap di wilayah ini. Faktor tersebut menyebabkan penduduk terutama pendatang yang bekerja dibidang pemerintahan lebih memilih untuk bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Raba. Sebaliknya wilayah Kecamatan RasanaE Timur mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 18.366 jiwa atau 11,71%. Wilayah Kecamatan RasanaE Timur sebagian besar adalah wilayah pegunungan. Penduduk cenderung memilih lereng gunung sebagai tempat untuk menetap.

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin tiap Kecamatan lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut



2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Struktur umur penduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktifitas penduduk pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan analisis struktur umur penduduk akan berkaitan dengan banyaknya penduduk di usia produktif di suatu daerah. Penduduk usia produktif artinya penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan tidak tergantung kepada orang lain. Penduduk usia produktif berkisar antara usia 15 - 64 tahun. Analisis struktur usia penduduk juga akan terkait dengan penyediaan angkatan kerja pada suatu daerah.

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat



disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah.

a) Umur Median (Median Age)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20 – 30 tahun;
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Tabel. 3.2
Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	KUMULATIF (fx)	% KUMULATIF
00-04	8.463	8.463	5,40
05-09	12.093	20.556	13,11
10-14	11.416	31.973	20,39
15-19	13.487	45.459	28,99
20-24	15.658	61.117	38,97
25-29	16.890	78.007	49,74
30-34	16.233	94.240	60,09
35-39	14.083	108.323	69,07
40-44	11.961	120.284	76,70
45-49	10.227	130.512	83,22
50-54	8.109	138.621	88,39
55-59	6.272	144.892	92,39
60-64	4.625	149.517	95,34
65-69	3.123	152.640	97,33
70-74	2.145	154.785	98,70
≥ 75	2.035	156.820	100,00
KOTA BIMA	156.820		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Untuk Kota Bima, berdasarkan data yang ada pada SIAK, umur median penduduk kota Bima pada tahun 2013 adalah 30 tahun, yang berarti bahwa setengah dari penduduk kota Bima pada tahun 2013 berusia di bawah 30 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 30 tahun. Umur median ini terletak diantara 20– 30 tahun, sehingga penduduk kota Bima dikategorikan sebagai penduduk intermediate.

b) Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai Rasio Jenis Kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, rasio jenis kelamin juga berguna bagi para politisi terutama untuk mengetahui seberapa besar keterwakilan kaum perempuan di parlemen.

Tabel 3.3.

Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok umur Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN
00-04	4.572	3.891	8.463	117,52
05-09	6.506	5.587	12.093	116,45
10-14	5.847	5.570	11.416	104,97
15-19	6.925	6.561	13.487	105,55
20-24	7.839	7.818	15.658	100,27
25-29	8.337	8.552	16.890	97,49
30-34	7.900	8.334	16.233	94,79
35-39	6.843	7.240	14.083	94,52
40-44	5.873	6.089	11.961	96,45
45-49	4.878	5.350	10.227	91,18
50-54	4.030	4.079	8.109	98,81
55-59	3.044	3.228	6.272	94,30
60-64	2.330	2.294	4.625	101,58
65-69	1.489	1.634	3.123	91,13



70-74	1.077	1.068	2.145	100,83
≥ 75	1.018	1.017	2.035	100,15
KOTA BIMA	78.509	78.311	156.820	100,25

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Rasio di Kota Bima tahun 2013 sebesar 100,25 persen yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100 - 101 penduduk laki-laki, ini menggambarkan penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk Perempuan.

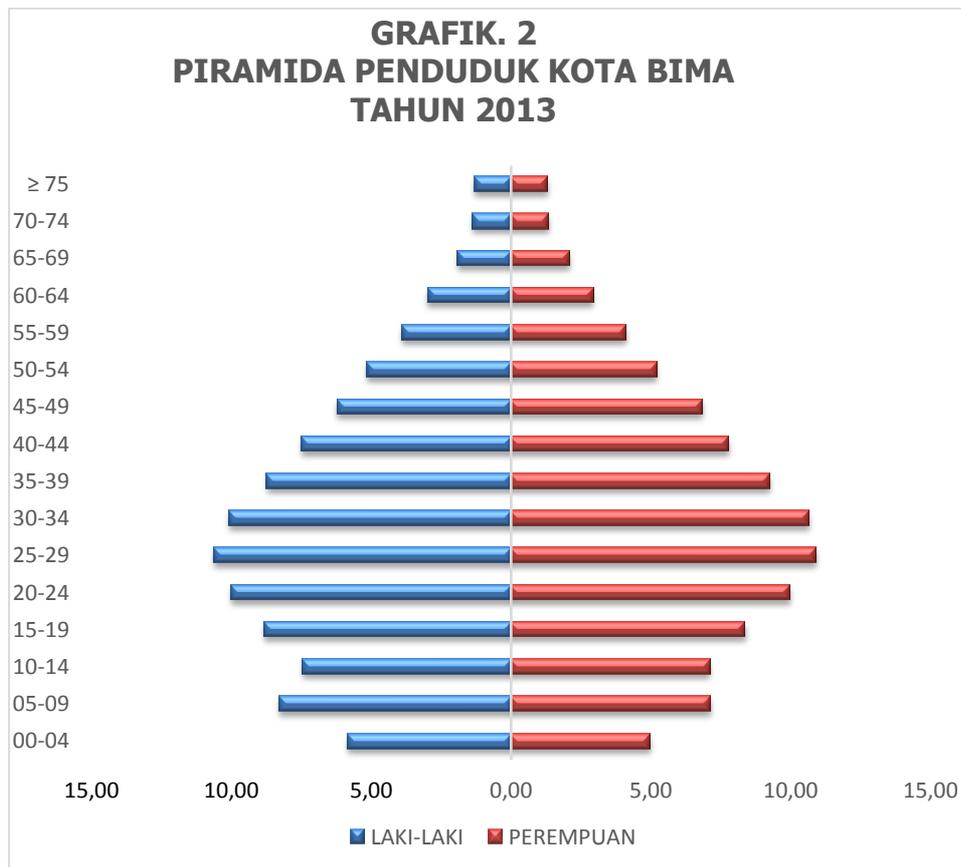
c). Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafis. Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Melihat besarnya penduduk usia muda (kurang dari 15 tahun) yakni 20,39 persen atau mendekati seperempat jumlah penduduk Kota Bima, maka hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut,



diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia.



Piramida Penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kota Bima saat ini didominasi penduduk usia produktif, terutama penduduk pada usia 20-34 tahun. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa kedepan nanti, penduduk Kota Bima sedang mengarah pada struktur penduduk tua. Terlihat pula bahwa penduduk berumur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida melebar. Ini berarti angka kelahiran cukup tinggi. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun terlihat lebih lebar dari kelompok umur dibawahnya, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan



menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang sangat kecil yaitu 1,99 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

d). Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio).

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Menurut usia, rasio ketergantungan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua. Dari perhitungan rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua dapat diketahui kelompok umur mana yang berkontribusi paling besar atau sedikit dalam rasio ketergantungan total.

Penduduk kota Bima yang dikelompokkan menjadi 3



kelompok umur, yaitu kelompok umur muda (0 – 14 tahun) sejumlah 25.977 jiwa, kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) sejumlah 95.510 Jiwa, dan kelompok umur tua (65 tahun keatas) sejumlah 5.925 jiwa.

Tabel 3.4
Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Produktif Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
00-14 tahun (Umur Muda)	16.925	15.047	31.973	20,39
15-64 Tahun (Umur Produktif)	57.999	59.545	117.544	74,96
>65 Tahun (Umur Tua)	3.584	3.719	7.303	4,66
Jumlah	78.509	78.311	156.820	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan total sebesar 33,41 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 33-34 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 33,41 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (20,39%) dan rasio penduduk tua (4,66%).

3. Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari satu daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu wilayah.

Rasio kepadatan penduduk (*Population Density Ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per



kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

Tabel 3. 5
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Bima Tahun 2013

NO	KELURAHAN/ KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN
1	PARUGA	6.019	0,91	6.614
2	NAE	4.841	0,31	15.616
3	SARAE	5.791	0,48	12.065
4	TANJUNG	7.170	0,79	9.076
5	PANE	3.074	0,31	9.916
6	DARA	7.391	7,34	1.007
	RASANA E BARAT	34.286	10,14	3.381
1	KUMBE	5.778	1,52	3.801
2	LAMPE	1.446	7,23	200
3	DODU	3.004	7,93	379
4	NUNGGGA	2.364	11,59	204
5	KODO	2.150	5,55	387
6	OI FOO	1.691	9,2	184
7	LELAMASE	1.933	21,05	92
	RASANA E TIMUR	18.366	64,07	287
1	MELAYU	7.173	0,76	9.438
2	JATIWANGI	10.031	22,18	452
3	JATIBARU	9.753	19,6	498
4	KOLO	5.435	26,49	205
	ASAKOTA	32.392	69,03	469
1	PENARAGA	5.287	0,74	7.145
2	RONTU	3.109	4,74	656
3	PENANA E	4.048	5,34	758
4	KENDO	1.489	9,08	164
5	NTOBO	3.697	31,19	119
6	NITU	1.416	6,19	229
7	RABANGODU SELATAN	3.867	1,43	2.704
8	RABADOMPU TIMUR	3.823	0,54	7.080
9	RITE	2.190	1,84	1.190
10	RABADOMPU BARAT	5.360	1,66	3.229
11	RABANGODU UTARA	5.255	0,98	5.362
	RABA	39.541	63,73	620
1	MONGGONAO	4.689	0,63	7.443
2	SADIA	3.815	0,68	5.610
3	SANTI	2.353	0,72	3.268
4	SAMBINA E	2.625	5,43	483
5	PENATOI	4.827	0,74	6.523
6	LEWIRATO	2.098	0,49	4.282
7	MANDE	2.606	0,69	3.777
8	PANGGI	2.859	3,51	815
9	MANGGEMACI	3.907	0,52	7.513



10	MATAKANDO	2.456	1,87	1.313
	MPUNDA	32.235	15,28	2.110
	KOTA BIMA	156.820	222,25	706

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari Tabel di atas diketahui Kota Bima mempunyai luas wilayah 222,25 Km² dan jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2013 sebanyak 156.820 jiwa maka kepadatan penduduk Kota Bima Tahun 2013 rata-rata 706 jiwa/ Km². Kecamatan dengan penduduk terpadat adalah kecamatan RasanaE Barat yaitu 3.881 jiwa/Km², sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan RasanaE Timur yaitu sebesar 287 jiwa/Km².

Melihat tingkat kepadatan Kota Bima, terjadi ketimpangan persebaran penduduk yang sangat besar antara Kecamatan. Kecamatan RasanaE Barat dan Mpunda merupakan pusat pemukiman penduduk, pemerintah, perdagangan, pendidikan dan kegiatan lainnya dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu luas wilayah dua kecamatan tersebut lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

4. Angka Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya.

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Pelaksanaan KTP Elektronik di Indonesia merupakan salah



satu usaha untuk mendata penduduk secara riil dan akurat. Selain itu juga dengan KTP elektronik ini diharapkan tidak ada lagi penduduk yang mempunyai KTP lebih dari satu, karena KTP elektronik ini dapat digunakan untuk pelayanan publik di luar domisili penduduk atau berlaku secara nasional. Selain itu, KTP elektronik ini dilengkapi dengan sidik jari dan iris yang mampu mendeteksi penduduk yang berkeinginan merekam e-KTP lebih dari 1 (satu) kali di wilayah lain.

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Tabel. 3.6.

Angka pertumbuhan penduduk Kota Bima Tahun 2010 – 2013

KECAMATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK
RASANA BARAT	32.675	34.286	4,93%
RASANA TIMUR	17.737	18.366	3,55%
ASAKOTA	30.649	32.392	5,69%
RABA	38.060	39.541	3,89%
MPUNDA	31.181	32.235	3,38%
KOTA BIMA	150.302	156.820	4,34%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Angka pertumbuhan penduduk Kota Bima tahun 2013 sebesar 4,34 persen. Angka ini berada di atas angka pertumbuhan penduduk nasional tahun 2012 yaitu sebesar 1,3 % dan angka pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu



sebesar 1,42 persen pertahun (Data Sensus Penduduk 2010

Pada tahun 2012 -2013 pertumbuhan penduduk yang tinggi salah satunya disebabkan masih terdapat data ganda pada database kependudukan. Data ganda tersebut terjadi karena adanya penduduk pindah dalam kota yang masih tetap terdaftar pada daerah asalnya, akan tetapi penduduk tersebut didaftar kembali di daerah tujuan pindah, sehingga muncul data ganda. Seharusnya data penduduk dari daerah asal dipindahkan ke daerah tujuan, bukan didaftarkan lagi dalam database. Demikian juga untuk data penduduk yang sudah meninggal dunia tidak dilakukan penghapusan data karena tidak ada laporan dari keluarga yang bersangkutan melalui kelurahan. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk dalam database kependudukan mengalami peningkatan.

Pada akhir tahun 2010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melakukan pemutakhiran data penduduk sebagai salah satu persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP (KTP Elektronik) yang berbasis NIK Nasional dimana Kota Bima termasuk dalam 197 Kabupaten/Kota yang wajib menerapkan e-KTP pada 2011. Pelaksanaan KTP Elektronik di Indonesia merupakan salah satu usaha untuk mendata penduduk secara riil dan akurat. Selain itu juga dengan KTP elektronik ini diharapkan tidak ada lagi penduduk yang mempunyai KTP lebih dari satu, karena KTP elektronik ini dapat digunakan untuk pelayanan publik di luar domisili penduduk atau berlaku secara nasional. KTP elektronik ini dilengkapi dengan sidik jari dan iris yang mampu mendeteksi penduduk yang berkeinginan merekam e-KTP lebih dari 1 (satu) kali di wilayah lain.

Angka pertumbuhan penduduk Kota Bima pada tahun 2013 adalah 4,34% Angka tersebut sangat berbeda dengan angka



pertumbuhan pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,62% dan tahun 2012 yaitu sebesar 8,29 % Hal ini dipengaruhi oleh pemutakhiran data.

Pada proses pemutakhiran data tersebut dilakukan penghapusan data ganda dan data penduduk yang sudah pindah atau meninggal dunia. Selanjutnya secara berkala, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melakukan monitoring dan evaluasi terhadap database kependudukan SIAK, sehingga meminimalisir adanya data ganda. Dan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan pertumbuhan penduduk Kota Bima akan stabil.

B. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KARAKTERISTIK SOSIAL

1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan kelas atau jenjang tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Gambaran tentang kualitas penduduk Kota Bima menurut pendidikan berdasarkan Database SIAK status 31 Desember 2013



adalah sebagaimana Tabel 3.6. berikut:

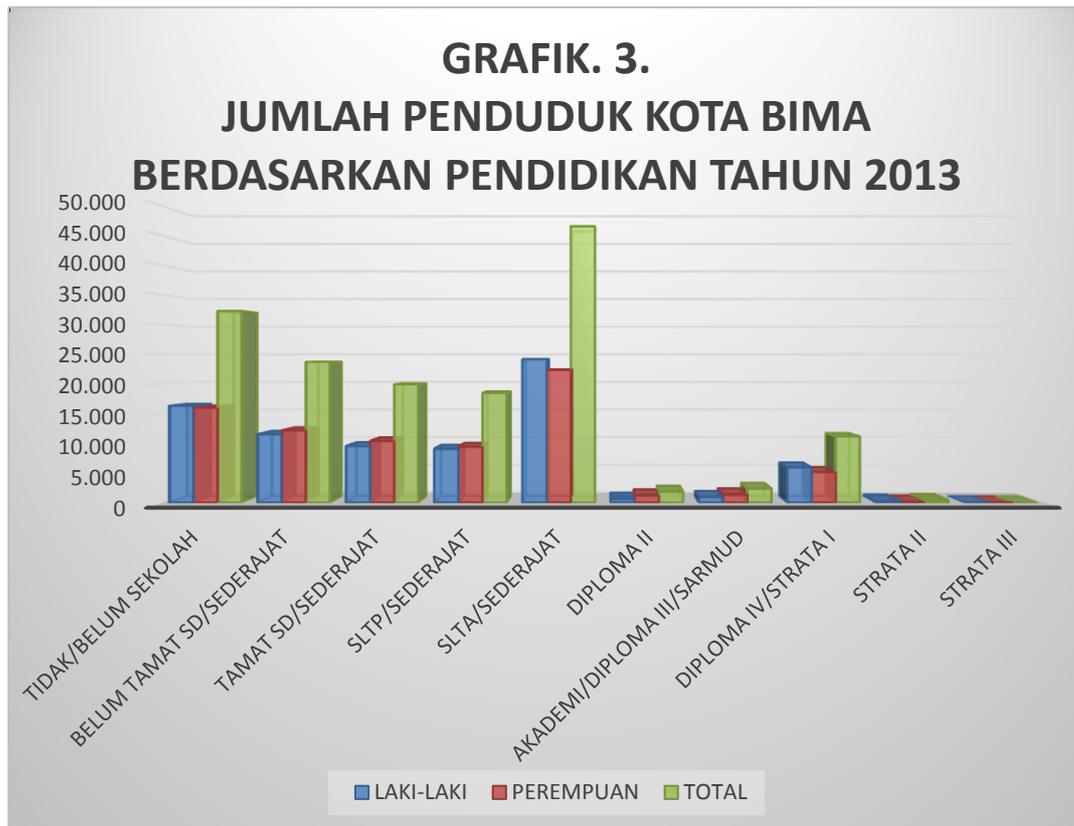
Tabel 3.7.
Penduduk Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir
Tahun 2013

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tidak/Belum Sekolah	16.300	20,762	15.986	20,413	32.286	20,588
Belum Tamat SD/Sederajat	11.532	14,689	12.177	15,550	23.709	15,119
Tamat SD/Sederajat	9.527	12,135	10.395	13,274	19.922	12,704
SLTP/Sederajat	9.078	11,563	9.421	12,030	18.499	11,796
SLTA/Sederajat	24.178	30,797	22.373	28,569	46.551	29,684
Diploma II	634	0,808	1.234	1,576	1.868	1,191
Akademi/Diploma III/SARMUD	961	1,224	1.418	1,811	2.379	1,517
Diploma IV/Strata I	5.968	7,602	5.173	6,606	11.141	7,105
Strata II	318	0,405	132	0,169	450	0,287
Strata III	12	0,015	2	0,003	14	0,009
Jumlah	78.509	100	78.311	100	156.820	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari tabel terlihat bahwa penduduk Kota Bima 29,687 persen berpendidikan SLTA/Sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan Diploma II dan Akademi/D-III/Sarjana Muda penduduk perempuan lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki.

Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, persentase yang menamatkan lebih rendah untuk perempuan dibandingkan untuk laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Kota Bima.



Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk kota Bima mayoritas adalah SLTA/Sederajat. Sedangkan untuk pendidikan tinggi Strata III, penduduk kota Bima masih sangat sedikit.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila : "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, Ekonomi dan budaya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-



masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel. 3.8

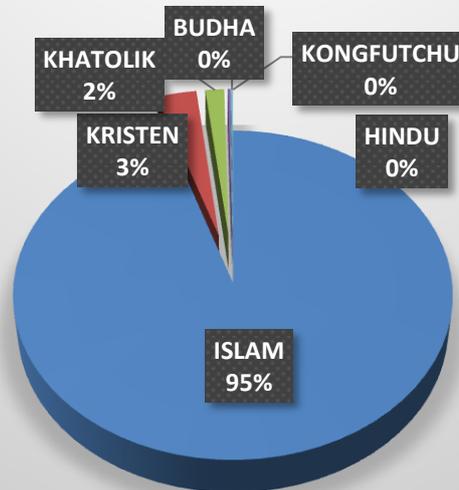
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kota Bima Tahun 2013

KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGFUTCHU	TOT
RASANA E BARAT	32.598	1.105	523	78	42	2	34.348
RASANA E TIMUR	18.434	8	0	3	0	0	18.445
ASAKOTA	31.603	324	187	154	4	0	32.272
RABA	39.115	171	148	122	0	0	39.556
MPUNDA	31.841	162	97	98	1	0	32.199
KOTA BIMA	153.591	1.770	955	455	47	2	156.820

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Bima 53,591 jiwa menganut agama islam dan ini menunjukkan bahwa kota Bima didominasi oleh penduduk yang beragama islam. Agama kedua terbesar setelah agama islam yang tersebar disetiap wilayah administrasi Kota Bima adalah agama kristen yakni 1,770 jiwa, agama Khatolik 955 jiwa, agama Hindu 455 jiwa dan agama budha 47 jiwa. Dengan beragamnya agama merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bima untuk membina masyarakat didalam menyerukan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya, mempunyai rasa aman dan tentram dalam menjalankan ibadah.

GRAFIK. 4 JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KOTA BIMA TAHUN 2013



Data tersebut juga dapat disajikan dalam bentuk diagram seperti di atas. Dari kedua penyajian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk kota Bima beragama Islam yaitu sebanyak 95 %, dan paling sedikit adalah agama kongfutchu sebanyak 2 jiwa atau 0%.

3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.



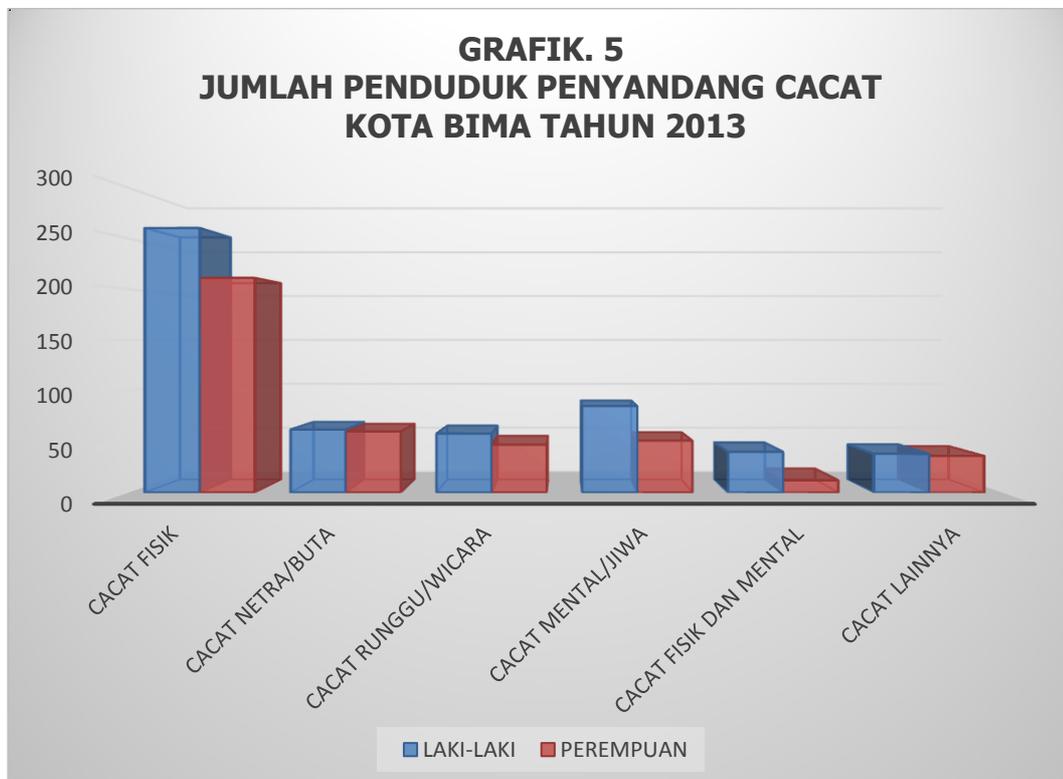
Tabel .3.13.

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

JENIS KECACATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
CACAT FISIK	260	47,88	211	50,60	471	49,06
CACAT NETRA/BUTA	62	11,42	60	14,39	122	12,71
CACAT RUNGGU/WICARA	58	10,68	47	11,27	105	10,94
CACAT MENTAL/JIWA	85	15,65	51	12,23	136	14,17
CACAT FISIK DAN MENTAL	40	7,37	12	2,88	52	5,42
CACAT LAINNYA	38	7,00	36	8,63	74	7,71
JUMLAH	543	100,00	417	100,00	960	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk penyandang cacat di Kota Bima adalah sebanyak 960 jiwa. Penyandang cacat terbanyak adalah cacat fisik yaitu sebanyak 471 jiwa. Sedangkan penyandang cacat paling sedikit adalah cacat fisik dan mental yaitu sebanyak 52 jiwa. Data tersebut dapat disajikan juga dalam bentuk grafik seperti di bawah ini.





Informasi tentang jumlah penyandang cacat dapat digunakan pemerintah Kota Bima untuk memberikan fasilitas kepada para penyandang cacat agar bisa melakukan aktifitas yang sama dengan penduduk lainnya. Contohnya adalah pendirian Sekolah Luar Biasa jika masih berada pada usia sekolah dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi penyandang cacat usia produktif. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan *kategori khusus*.

4) Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam pengembangan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidak siapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de yure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu



daerah, dengan proporsi kawin yang tinggi akan menaikkan tingkat kelahiran.

Tabel 3.14.
Jumlah penduduk menurut status kawin

JENIS KELAMIN/ KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI MATI		CERAI HIDUP		JUMLAH PENDUDUK	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
LAKI-LAKI (L)										
RASANA E BARAT	9.732	56,56	7187	41,77	109	0,63	180	1,04	17.208	100,00
RASANA E TIMUR	4.695	50,89	4340	47,04	42	0,45	150	1,62	9.227	100,00
ASAKOTA	9.015	55,02	7159	43,69	62	0,38	149	0,91	16.385	100,00
RABA	10.434	53,07	8864	45,09	109	0,55	253	1,29	19.660	100,00
MPUNDA	8.844	55,17	6988	43,60	66	0,41	131	0,82	16.029	100,00
KOTA BIMA	42.720	54,41	34.539	43,99	387	0,49	862	1,10	78.509	100,00
PEREMPUAN (P)										
RASANA E BARAT	8.585	50,27	7366	43,13	291	1,71	836	4,90	17.078	100,00
RASANA E TIMUR	4.185	45,79	4436	48,53	95	1,04	423	4,63	9.139	100,00
ASAKOTA	7.959	49,72	7269	45,41	200	1,25	579	3,62	16.007	100,00
RABA	9.496	47,76	9112	45,83	285	1,44	988	4,97	19.881	100,00
MPUNDA	8.287	51,13	7112	43,88	220	1,36	587	3,62	16.206	100,00
KOTA BIMA	38.512	49,18	35.294	45,07	1.092	1,39	3.413	4,36	78.311	100,00
L + P										
RASANA E BARAT	18.317	53,42	14553	42,45	400	1,17	1016	2,96	34.286	100,00
RASANA E TIMUR	8.880	48,35	8776	47,78	137	0,75	573	3,12	18.366	100,00
ASAKOTA	16.974	52,40	14428	44,54	262	0,81	727	2,25	32.392	100,00
RABA	19.930	50,40	17976	45,46	394	1,00	1241	3,14	39.541	100,00
MPUNDA	17.130	53,14	14100	43,74	286	0,89	719	2,23	32.235	100,00
KOTA BIMA	81.232	51,80	69833	44,53	1480	0,94	4275	2,73	156.820	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa banyaknya penduduk belum kawin adalah 81,232 jiwa. Ini berarti bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Kota Bima masih belum kawin. Jika dilihat pada Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok umur maka penduduk usia di bawah 40 tahun mencapai 69,04%. Jadi untuk 5 – 10 tahun kedepan Kota Bima diperkirakan akan mempunyai angka pertumbuhan penduduk yang tinggi.

a) Angka Perkawinan Kasar (APK)

Perkawinan merupakan variable antara yang mempengaruhi fertilitas, antara lain melalui panjang dan pendeknya usia subur yang dilalui pasangan usia subur (PUS).

Angka perkawinan kasar menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan suatu tahun tertentu. Meskipun angka ini masih kasar tetapi dapat menunjukkan kondisi besaran penduduk yang kawin di wilayah tertentu. Selain itu walaupun indikator ini masih kasar namun dapat dijadikan dasar mengembangkan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan keluarga dan rumah tangga, dan lain-lain.

Jumlah penduduk awal tahun 2013 sebesar 150,322 jiwa dan penduduk pertengahan tahun 2013 Kota Bima sebesar 153,970 jiwa sedangkan penduduk yang kawin di Kota Bima Tahun 2013 tercatat sebesar 1.440 jiwa dengan demikian angka perkawinan kasar di Kota Bima adalah 6,33 jiwa artinya bahwa dari 1000 penduduk Kota Bima pada tahun 2013 terdapat 6 jiwa penduduk



yang berstatus kawin atau sebanyak 6 kali terjadi peristiwa perkawinan.

b. Angka Perkawinan Umum (AKU)

Angka Perkawinan Umum (AKU) merupakan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka perkawinan umum sedikit lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar, karena faktor pembagiannya adalah penduduk dalam 'usia kawin' atau beresiko kawin atau penduduk usia 15 tahun ke atas.

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Kota Bima tahun 2013 sebesar 124,828 jiwa dan jumlah penduduk berstatus kawin di Kota Bima tahun 69,833 jiwa. Dengan demikian angka perkawinan umum di Kota Bima adalah 55,94 artinya bahwa dari 100 penduduk Kota Bima tahun 2013 terdapat 55 sampai 56 penduduk yang berstatus kawin, hal ini menunjukkan gejala bahwa masih adanya perkawin usia muda.

Tabel.3.15.

Angka Perkawinan Umum menurut Kecamatan Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERSTATUS KAWIN	PENDUDUK USIA 15 TH +	AKU
RASANA E BARAT	14.553	27.309	53,29
RASANA E TIMUR	8.776	14.773	59,40
ASAKOTA	14.428	24.992	57,73
RABA	17.976	31.865	56,41
MPUNDA	14.100	25.889	54,46
KOTA BIMA	69.833	124.828	55,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Dari Tabel 3.15 terlihat bahwa Angka Perkawinan Umum tertinggi di Kecamatan RasanaE Timur yaitu 59,40 disusul Kecamatan Asakota dengan Angka Perkawinan umum yaitu 57,73, Kecamatan Raba dengan Angka Perkawinan Umum 56,41, Kecamatan Mpunda dengan Angka Perkawinan Umum 54,46 dan yang terkecil adalah Kecamatan RasanaE Barat dengan Angka Perkawinan Umum yaitu 53,29

c. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Tabel.3.15.

Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH STATUS KAWIN		PENDUDUK USIA 15 TH +		ANGKA PERKAWINAN KELOMPOK UMUR	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
RASANA E BARAT	7.187	7.366	13.471	13.839	53,35	53,23
RASANA E TIMUR	4.340	4.436	7.287	29.154	59,56	15,22
ASAKOTA	7.159	7.269	12.328	12.664	58,07	57,40
RABA	8.864	9.112	15.718	16.147	56,39	56,43
MPUNDA	6.988	7.112	12.770	13.119	54,72	54,21
KOTA BIMA	34.539	35.294	61.574	63.254	56,09	55,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap 100 orang penduduk laki-laki terdapat 56 orang yang berstatus kawin, begitu pula dengan penduduk perempuan, dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 55 – 56 yang berstatus kawin.

d. Angka Perceraian Kasar (Divorce)

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh sepasang suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari sesuatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hokum yang berlaku. Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar ini merupakan indicator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Jumlah penduduk pertengahan tahun Kota Bima tahun 2013 sebesar 153.595 jiwa dan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup di Kota Bima pada tahun 2013 tercatat sebanyak 4.275 jiwa. Dengan demikian angka perceraian kasar di Kota Bima adalah 2,78 artinya bahwa dari 100 penduduk Kota Bima pada tahun 2013 terdapat 2 sampai 3 penduduk yang berstatus cerai hidup.



Tabel. 3. 16.

Angka Perceraian Kasar menurut Kecamatan di Kota Bima

KECAMATAN	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN	APK
RASANA E BARAT	1.016	33.395	3,04
RASANA E TIMUR	573	18.123	3,16
ASAKOTA	727	31.329	2,32
RABA	1.241	38.890	3,19
MPUNDA	719	31.858	2,26
KOTA BIMA	4.276	153.595	2,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

e. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum (APU) menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas atau penduduk yang terkena resiko perceraian atau disebut juga penduduk berumur *divorceable* pada suatu tahun tertentu.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Bima tahun 2013 sebesar 124,828 jiwa dan jumlah penduduk berstatus cerai hidup di Kota Bima pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 4.276 jiwa. Dengan demikian angka perceraian umum di Kota Bima adalah 3,43 artinya bahwa dari 100 penduduk Kota Bima pada tahun 2013 terdapat 3 sampai 4 orang penduduk yang berstatus cerai hidup.

Dari Tabel 3.17 terlihat bahwa Angka Perceraian Umum tertinggi di Kecamatan Raba yaitu 3,89 disusul Kecamatan RasanaE Timur yaitu 3,88, Kecamatan RasanE Barat 3,72, Kecamatan Asakota yaitu 2,91 dan yang terkecil adalah Kecamatan Mpunda dengan angka perceraian umum 2,78.



Tabel 3.17

Angka Perceraian Umum menurut Kecamatan di Kota Bima

KECAMATAN	JUMLAH STATUS CERAI HIDUP	PENDUDUK USIA 15 TH +	APU
RASANA E BARAT	1.016	27.309	3,72
RASANA E TIMUR	573	14.773	3,88
ASAKOTA	727	24.992	2,91
RABA	1.241	31.865	3,89
MPUNDA	719	25.889	2,78
KOTA BIMA	4.276	124.828	3,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

C. KELUARGA

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu inti/batih (*nuclear Family*) dan keluarga luas



(*Extended Family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Pada saat sekarang ini sudah muncul adanya keluarga yang terdiri dari tiga generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu, dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches Family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bias berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Tabel. 3.18

Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Kota Bima Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
RASANA E BARAT	34.286	8.777	3,91
RASANA E TIMUR	18.366	5.037	3,65
ASAKOTA	32.392	8.211	3,94
RABA	39.541	10.552	3,75
MPUNDA	32.235	8.032	4,01
KOTA BIMA	156.820	40.608	3,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Jumlah keluarga di Kota Bima sebanyak 40.608 keluarga yang tersebar di 5 wilayah Kecamatan. Kecamatan Raba memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 10,552 keluarga kemudian disusul oleh



Kecamatan RasanaE Barat sebanyak 8.777 keluarga, Kecamatan Asakota sebanyak 8,211 keluarga, Kecamatan Mpunda sebanyak 8,032 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan RasanE Timur yaitu 5,037 keluarga.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Bima sebanyak 3,86 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Bima lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Bila diperhatikan menurut wilayah Kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan terdiri dari 3 – 4 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kota Bima dan dapat digunakan pemerintah kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

2. Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Dari Tabel. 19. nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 35.380 kepala keluarga laki-laki (45,06 %) yang mempunyai isteri sebanyak 32.883 orang (41,99%), sedangkan dari 5.228 kepala keluarga perempuan (6.68%) hanya 3 orang (0,00%) saja yang bersuami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya



berstatus lajang baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Tabel. 3.19
Jumlah Penduduk berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Kota Bima Tahun 2013

STATUS HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Kepala Keluarga	35.380	45,06	5.228	6,68	40.608	25,89
Suami	3	0,00	0	0,00	3	0,00
Istri	0	0,00	32.883	41,99	32.883	20,97
Anak	39.550	50,37	35.648	45,52	75.197	47,95
Menantu	12	0,01	24	0,03	36	0,02
Cucu	789	1,00	768	0,98	1.557	0,99
Orang Tua	140	0,18	531	0,68	670	0,43
Mertua	75	0,10	316	0,40	391	0,25
Famili Lain	2.426	3,09	2.699	3,45	5.125	3,27
Pembantu	11	0,01	46	0,06	56	0,04
Lainnya	131	0,17	162	0,21	293	0,19
Jumlah	78.515	50,07	78.305	49,93	156.820	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 5,18 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kota Bima jumlahnya tidak besar. Namun demikian, perlu diperhatikan adalah keluarga luas yang dikepalai oleh perempuan, jumlahnya lebih besar dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki.



3. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, umur, status kawin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 3.20.

Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan di Kota Bima

KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
RASANA BARAT	7.433	21,01	1.343	25,70	8.777	21,61
RASANA TIMUR	4.459	12,60	578	11,06	5.037	12,40
ASAKOTA	7.300	20,63	911	17,42	8.211	20,22
RABA	9.050	25,58	1.502	28,72	10.552	25,98
MPUNDA	7.137	20,17	894	17,11	8.032	19,78
KOTA BIMA	35.380	87,12	5.228	12,88	40.608	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Tabel 3.20 menyajikan jumlah dan proporsi kepala keluarga Kota Bima tahun 2013 menurut wilayah Kecamatan dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Bima adalah laki-laki yaitu 35.380 kepala keluarga (81,12 %), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 5.228 (12.88%) atau dengan perbandingannya sekitar 7:1, yang artinya dari 7 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain. Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala



keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Selain itu, penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern yakni perempuan yang hidup melajang (tidak/belum kawin).

4. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, social maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 3.21.

Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Kawin di Kota Bima Tahun 2013

STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
BELUM KAWIN	465	1,31	742	14,18	1.207	2,97
KAWIN	34.221	96,72	1.307	24,99	35.528	87,49
CERAI HIDUP	233	0,66	1.065	20,36	1.298	3,20
CERAI MATI	461	1,30	2.116	40,46	2.577	6,34
JUMLAH	35.380	87,13	5.228	12,87	40.608	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Dari tabel di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kota Bima pada tahun 2013 berstatus kawin yakni 87,49 persen, dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 2,97 persen. Selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 9,54 persen.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki yakni 96,72 persen. Sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yakni 24,99 persen.

Selanjutnya dari table tersebut terlihat bahwa presentase kepala keluarga laki-laki yang berstatus belum kawin (lajang) presentasinya lebih rendah yakni 1,31 persen dari pada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang yakni 14,18 persen.

Bila diperhatikan lebih lanjut, kepala keluarga laki-laki berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) persentasenya lebih rendah yakni 1,96 persen dari pada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai yakni 60,82 persen.

5. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status social dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunsksn untuk mrelihat gambaran kualitas social maupun ekonomi keluarga.



Tabel 3.22.
Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2013

PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		%		%		%
Tidak/Belum Sekolah	762	3,29	328	9,05	1.090	4,07
Belum Tamat SD/Sederajat	1.510	6,53	479	13,21	1.989	7,43
Tamat SD/Sederajat	3.913	16,92	848	23,39	4.761	17,79
SLTP/Sederajat	3.373	14,58	535	14,75	3.908	14,60
SLTA/Sederajat	10.006	43,26	826	22,78	10.832	40,48
Diploma II	267	1,15	64	1,77	331	1,24
Akademi/Diploma III/SARMUD	387	1,67	353	9,74	740	2,77
Diploma IV/Strata I	2.711	11,72	186	5,13	2.897	10,83
Strata II	197	0,85	6	0,17	203	0,76
Strata III	6	0,03	1	0,03	7	0,03
JUMLAH	23.132	100,00	3.626	100,00	26.758	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 40,48 persen, disusul dengan tamat SD/ sederajat sebesar 17,79 persen dan SLTP/ sederajat sebesar 14,60 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 4,01 persen dan S1/S2/S3 sebesar 11,66 persen . Keluarga yang tidak sekolah yang presentasenya mencapai 4,07 persen. Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga



diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

6. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 3.23.
Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Bekerja di Kota Bima Tahun 2013

STATUS BEKERJA	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		%		%		%
Bekerja	20.813	90,34	835	23,03	21.648	81,19
Belum/tidak bekerja	1.036	4,50	322	8,88	1.358	5,09
Pelajar/mahasiswa	36	0,16	33	0,91	69	0,26
Pensiun	1.153	5,00	49	1,35	1.202	4,51
Mengurus Rumah Tangga	-	-	2.387	65,83	2.387	8,95
Jumlah	23.038	86,40	3.626	13,60	26.664	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dilihat dari kegiatan ekonomi, bahwa 86,40 persen kepala keluarga di Kota Bima bekerja. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan kepala keluarga perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas. Sementara itu, sekitar 5,09 persen kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bima berkaitan dengan adanya



keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase merekakecil, sehingga pemerintah Kota Bima perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Selanjutnya tabel di atas juga menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga yaitu 8,95 persen. Selanjutnya dari tabel tersebut, terlihat adanya kepala keluarga yang sudah pensiun.

D. KELAHIRAN (FERTILITAS)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran *hidup (live birth)*, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Seorang perempuan yang secara biologis subur (*fecund*) tidak selalu melahirkan anak-anak yang banyak, misalnya dia mengatur fertilitas dengan abstinensi atau menggunakan alat-alat kontrasepsi. Kemampuan biologis seorang perempuan untuk melahirkan sangat sulit untuk diukur. Ahli demografi hanya menggunakan pengukuran terhadap kelahiran hidup (*live birth*).

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Disamping itu seorang yang meninggal pada hari dan waktu tertentu, berarti mulai saat itu orang tersebut tidak mempunyai resiko kematian lagi. Sebaliknya seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti resiko melahirkan dari



perempuan tersebut menurun. Memperhatikan kompleksnya pengukuran terhadap fertilitas tersebut, maka memungkinkan pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan dengan dua macam pendekatan : pertama, Pengukuran Fertilitas Tahunan (*Yearly Performance*) yakni Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*), Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*), Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), dan kedua, Pengukuran Fertilitas Kumulatif (*Reproductive History*) yakni jumlah anak yang pernah dilahirkan (*Children Ever Born/CEB*) dan jumlah anak dan wanita (*Child Woman Ratio/CWR*).

Disamping itu, kelahiran juga merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan social terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu. Anak dan pembangunan keluarga.

1. Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk



perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Jumlah kelahiran hidup yang dilaporkan oleh penduduk dan selanjutnya diterbitkan Nomor Induk Penduduk (NIK) Kota Bima selama tahun 2013 adalah 1.362 jiwa, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin dan Kecamatan sebagaimana Tabel 3.24.

Tabel 3.24.
Jumlah Kelahiran Hidup Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan , Tahun 2013

Kecamatan	Kelahiran					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
RasanaE Barat	188	46,19	219	53,81	407	20,88
RasanaE Timur	103	51,76	96	48,24	199	10,21
Asakota	195	53,57	169	46,43	364	18,68
Raba	290	52,73	260	47,27	550	28,22
Mpunda	215	50,12	214	49,88	429	22,01
Kota Bima	991	50,85	958	49,15	1.949	100

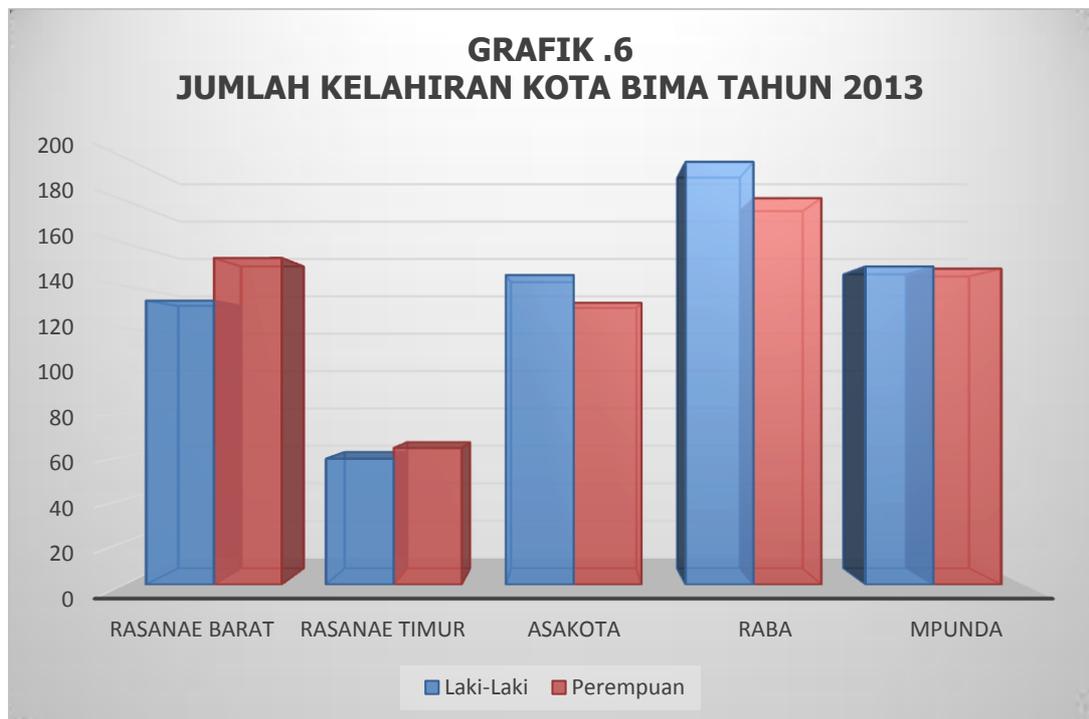
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Tabel 3.24 menunjukkan jumlah dan proporsi kelahiran menurut Kecamatan di Kota Bima. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kelahiran bayi laki-laki di Kota Bima lebih tinggi dibandingkan dengan kelahiran bayi perempuan. Secara biologis bahwa jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah kelahiran bayi perempuan. Jika dilihat menurut wilayah, Kecamatan Raba merupakan wilayah dengan Jumlah kelahiran hidup terbesar yakni 550 jiwa (28,22%), diikuti Kecamatan Mpunda yakni 429 jiwa (22,01%), dan Kecamatan



RasanaE Barat yakni 407 jiwa (20,88%), diikuti Kecamatan Asakota yakni 364 jiwa (18,68%) sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan wilayah dengan jumlah kelahiran terkecil yakni 199 jiwa (10-21%).

Jumlah kelahiran hidup menurut Kecamatan dan jenis kelamin dapat digambarkan pula dalam bentuk Grafik, sebagaimana terlihat dibawah ini



2. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/ CBR*)

Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak dan orang tua). Angka Kelahiran Kasar (CBR)



ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Berdasarkan Tabel 3.22, Angka Kelahiran Kasar di Kota Bima sebesar 10,12, artinya dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 10 kelahiran hidup.

Tabel 3.22.
Angka Kelahiran Kasar Berdasarkan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN	ANGKA KELAHIRAN KASAR
RASANA E BARAT	286	33.395	8,56
RASANA E TIMUR	123	18.123	6,79
ASAKOTA	277	31.329	8,84
RABA	379	38.890	9,75
MPUNDA	297	31.858	9,32
KOTA BIMA	1362	153.595	8,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Tabel diatas menunjukkan Angka Kelahiran Kasar Kota Bima berdasarkan kecamatan. Terlihat bahwa angka Kelahiran Kasar Kota Bima sebesar 8,87, artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 9 kelahiran hidup.

E. KEMATIAN (MORTALITAS)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari tiga komponen demografi selain fertilitas dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kematian dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan dan dimana saja. Kasus kematian terutama dalam



jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk disuatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk disuatu daerah.

Informasi mengenai kematian sangatlah penting, tidak hanya bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk pemberantasan kemiskinan. Selain itu data kesehatan juga berfungsi untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Ukuran dasar mortalitas dinyatakan dalam "angka" (*rate*) yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kematian di suatu daerah. Sedangkan indikator kematian dari sisi kuantitas antara lain :

1. Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/ mortalitas lainnya. Jumlah kematian penduduk Kota Bima berdasarkan registrasi penduduk pada tahun



2012 adalah 535 Jiwa, yang terdiri dari 327 jiwa laki-laki dan 208 jiwa perempuan.

Tabel 3.23.
Jumlah Kematian Menurut Wilayah Kecamatan dan Jenis kelamin Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Kematian			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
RasanaE Barat	51	36	87	19,82
RasanaE Timur	42	51	93	21,18
Asakota	33	28	61	13,90
Raba	48	47	95	21,64
Mpunda	51	52	103	23,46
Kota Bima	225	214	439	100
% Baris	51,25	48,75	100	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Tabel 3.23 menunjukkan bahwa, laki-laki lebih rentan terhadap kematian, hal ini terlihat dari 439 kematian, sebesar 51,25 persen adalah laki-laki dan 48,75 persen adalah perempuan. Jika dilihat menurut wilayah Kecamatan, jumlah kematian tertinggi di Wilayah Kecamatan Mpunda yakni 103 jiwa (25,46%), diikuti wilayah Kecamatan Raba sebanyak 95 jiwa (21,64%), Wilayah Kecamatan RasanaE Timur yakni 93 jiwa (21,18%), Wilayah Kecamatan RasanaE Barat sebanyak 87 jiwa (19,82%), dan jumlah kematian terendah adalah Wilayah Kecamatan Asakota yakni 61 jiwa (13,90%).

2. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Angka Kematian Kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator



seederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.

Tabel 3.24.

Angka Kematian Kasar Kota Bima Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN	ANGKA KEMATIAN KASAR
RasanaE Barat	87	33.395	2,61
RasanaE Timur	93	18.123	5,13
Asakota	61	31.329	1,95
Raba	95	38.890	2,44
Mpunda	103	31.858	3,23
Jumlah	439	153.595	2,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Pada tabel 3.24 terlihat bahwa angka kematian kasar (CDR) Kota Bima pada Tahun 2013 sebesar 2,86. Artinya dari setiap 1.000 penduduk terjadi 2-3 orang meninggal. Jika diperhatikan menurut wilayah Kecamatan, angka kematian kasar tertinggi di wilayah Kecamatan RasanaE Timur, diikuti Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Raba. Angka Kematian terendah di Kecamatan Asakota yakni 1,95 atau dari 1.000 penduduk terdapat 1-2 orang meninggal dunia.



BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI BIDANG KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tingkat pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita. IPM Kota Bima setiap tahun selalu meningkat yakni 65,94 pada tahun 2006 meningkat menjadi 69,1 pada tahun 2011. Kenaikan IPM Kota Bima selama 2006 – 2011, sejalan dengan kenaikan IPM di Propinsi NTB dari 63,04 pada tahun 2006 menjadi 66,23 pada tahun 2011. Pencapaian IPM Kota Bima yang mencapai 69,1 menempatkan Kota Bima sebagai daerah yang mempunyai kriteria pembangunan manusia menengah atas dalam pembangunan manusia.

Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi, antara lain, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya taraf kesehatan sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakatnya.

A. Kesehatan

1. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas adalah istilah yang digunakan untuk mengindikasikan banyaknya anak yang lahir hidup. Jadi fertilitas mengukur kemampuan



reproduksi perempuan yang diperkirakan dengan menggunakan angka kelahiran hidup. Banyaknya kelahiran yang muncul pada tahun tertentu dalam suatu populasi ditentukan oleh faktor-faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, banyaknya perkawinan, lamanya perkawinan, dan banyaknya anak yang lahir. Selain itu, banyaknya kelahiran juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, misalnya kondisi rumah, pendidikan, pendapatan, agama, dan pandangan mengenai ukuran keluarga.

a. Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, dengan demikian tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok Umur (ASFR) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama.

Tabel 4.1.

Angka Kelahiran Menurut Kelompok umur Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ANGKA KELAHIRAN MENURUT UMUR (ASFR)
15-19	6.561	292	13
20-24	7.818	452	20
25-29	8.552	499	22
30-34	8.334	382	17
35-39	7.240	314	14
40-44	6.089	187	8
45-49	5.350	121	5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Tabel di atas menunjukkan Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Kota Bima Tahun 2013. ASFR terendah pada kelompok umur 45-49 dan umur 40-44 dan tertinggi pada kelompok umur 25-29 tahun, artinya bahwa dari 100 perempuan berumur 25-29 tahun terjadi 22 kelahiran hidup.

b. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun).

Informasi Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) berguna untuk mengambil keputusan dan perencanaan dalam merencanakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas diketahui bahwa Angka Kelahiran Total di Kota Bima pada setiap perempuan akan melahirkan anak sebanyak 5 anak sampai akhir masa reproduksinya (15-49 Tahun).

c. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio Anak-Ibu (*CWR*) merupakan indikator fertilitas yang cukup sederhana. Semakin rendah CWR mengindikasikan semakin rendah tingkat fertilitas di suatu wilayah. Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu. Selain itu, Rasio ini juga berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.



Tabel 4.2.

Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR) Kota Bima Tahun 2013

KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN	PENDUDUK PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CWR)
RASANA BARAT	1.870	10.962	17,06
RASANA TIMUR	938	5.675	16,53
ASAKOTA	1.897	10.215	18,57
RABA	2.148	12.536	17,13
MPUNDA	1.610	10.556	15,25
KOTA BIMA	8.463	49.944	16,94

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2013,

Tahun 2013 di Kota Bima terdapat 16-17 anak balita (0-4 tahun) pada setiap 100 perempuan usia reproduktif. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 16-17 balita. Wilayah Kecamatan Asakota merupakan wilayah dengan rasio jumlah anak terhadap perempuan usia reproduktif (CWR) tertinggi yakni 18,57 atau terdapat 18-19 balita pada setiap 100 perempuan usia produktif. Sedangkan rasio jumlah anak terhadap jumlah perempuan (CWR) terendah di Wilayah Kecamatan mpunda yaitu sebesar 15,25 atau terdapat 15 balita pada setiap 100 perempuan usia produktif.

2. Kematian (Mortalitas)

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan dibidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dll.



Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degenerative, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Penyakit dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degenerative, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian.

Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit system pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak – anak

a. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Kematian bayi sebelum 1 bulan (neonatal) umumnya berhubungan dengan kondisi sewaktu kehamilan/kelahiran seperti kelahiran pre-term, berat badan lahir rendah, infeksi, *asphyxia*, dan neo-natal tetanus.

Sedangkan kematian lepas baru lahir (post neo-natal) umumnya penyebab kematian post neo-natal di negara-negara berkembang adalah diare dan pneumonia dan upaya preventif mengurangi kematian post-neonatal adalah melalui peningkatan gizi dan pemberian ASI selain vaksinasi/imunisasi lengkap.

Berikut ini adalah Angka Kematian Bayi pada tahun 2012 yang bersumber dari pelaporan penduduk di kelurahan dan diproses melalui SIAK.



Tabel 4.3

Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Kelahiran hidup		Kematian bayi		AKB/IMR
	Σ	%	Σ	%	
RasanaE Barat	286	21,00	10	34,48	3,50
RasanaE Timur	123	9,03	2	6,90	1,63
Asakota	277	20,34	7	24,14	2,53
Raba	379	27,83	5	17,24	1,32
Mpunda	297	21,81	5	17,24	1,68
Kota Bima	1.362	100	29	100	2,13

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa Angka kematian bayi di Kota Bima sebesar 2,13 artinya dari 100 kelahiran hidup di Kota Bima terjadi sebanyak 2 kematian bayi, dan Kecamatan Asakota merupakan wilayah dengan angka kematian bayi tertinggi yaitu 3-4 kematian bayi per 100 kelahiran hidup dan Kecamatan Raba memiliki angka kematian terendah yakni 1,32 atau terdapat 1-2 kematian bayi per 100 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, misalnya seperti kecelakaan atau terjatuh, dan lain-lain.



Tabel 4.4.
Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate-MMR*) Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian ibu				AKI/MMR
		Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
RasanaE Barat	286	0	1	0	1	3,50
RasanaE Timur	123	1	1	0	2	16,26
Asakota	277	0	1	0	1	3,61
Raba	379	1	0	1	2	5,28
Mpunda	297	0	1	0	1	3,37
Kota Bima	1.362	2	4	1	7	5,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Angka Kematian Ibu di Kota Bima pada Tahun 2013 sebesar 5.14 artinya bahwa di Kota Bima pada tahun 2013 terdapat 5 kematian maternal per 1.000 kelahiran hidup. Jika dilihat menurut wilayah Kecamatan, angka kematian ibu tertinggi Kecamatan Rasanae Timur yakni 16,26 diikuti Kecamatan Raba yakni 5,28 dan Kecamatan Asakota yakni 3,61. Juga Kecamatan RasanaE Barat 3,50 serta kecamatan Mpunda 3,37 merupakan angka kematian ibu yang terendah. Kematian Ibu/maternal bisa disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan kehamilan atau memburuk akibat kehamilan, atau disebabkan karena pertolongan kelahiran yang tidak tepat (tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kelalaian. Kematian maternal ini dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan kehamilan dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.



B. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Pengertian Angka Melek Huruf (AMH) menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka melek huruf merupakan persentase/proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari - hari.

Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk :

- a. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- b. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- c. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Secara umum Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Bima pada periode 2008-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 AMH Kota Bima tercatat sebesar 92,60%, di tahun 2009 terjadi sedikit peningkatan dan berada pada angka 92,80%. Dalam kurun 2010 hingga 2011 AMH mengalami



peningkatan, yaitu dari 93,80% di tahun 2011, 93,80% dan pada akhir tahun 2012 terjadi penurunan menjadi sebesar 77,58% dan pada akhir tahun 2013 meningkat lagi yaitu 95,91 Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk Kota Bima mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia. Dengan tingginya angka melek huruf ini, pemerintah Kota Bima telah berhasil memberantas buta huruf.

Tabel. 4.5**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s/d 2013 Kota Bima**

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	91.032	92.741	100.507	111.426	120.088	124.848
2	Angka Melek Huruf	92,6	92,8	93,7	93,8	77,58	95,91
3	Angka Buta Huruf	7,4	7,2	6,3	6,23	6,2	4.09

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan



SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

APM murid di Kota Bima untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat 92,49 persen. Adanya selisih antara APK SD dan APM SD sebesar 16,04 persen, menunjukkan bahwa terdapat 16,04 persen murid SD yang tinggal kelas atau adanya siswa terlalu muda saat masuk SD. Jika diperhatikan bahwa APM SLTP lebih rendah dibandingkan dengan APM SD maupun APM SLTA yaitu 87,49 persen. Hal ini diduga bahwa banyak murid yang tinggal kelas ataupun adanya murid yang tidak terhitung dikarenakan usianya yang terlalu muda atau terlalu tua dari standar umur SLTP dan ini dapat terlihat dari selisih APK SLTP dengan APM SLTP yaitu 26,84 persen. Informasi ini menggambarkan bahwa belum semua penduduk usia sekolah (usia SD,SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat) yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, terutama pada jenjang SLTP/ sederajat hanya 87-88 orang dari 100 orang penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SLTP/ sederajat tertuang pada Tabel berikut.



Tabel 4.6.

Perkembangan angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2008 s.d 2013 Kota Bima

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI						
-	Jumlah siswa kelompok Usia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16.358	16.045	16.174	16.937	15.461	13.286
-	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	16.879	16.517	16.357	17.182	16.715	13.760
-	APM SD/MI	96,91%	97,14%	98,88%	98,57%	92,49%	96,56%
2.	SMP/MTs						
-	Jumlah siswa kelompok Usia 13 - 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	8.302	8.218	8.413	8.696	7.134	5.826
-	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	10.068	9.154	8.870	9.161	8.162	6.287
-	APM SMP/MTs	82,46%	89,86%	94,85%	94,92%	87,49%	92,67%
3.	SMA/MA/SMK						
-	Jumlah siswa kelompok Usia 16 - 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	9.993	10.936	8.652	10.646	8.375	7.410
-	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun	11.680	12.016	9.043	12.207	9.302	8.155
-	APM SMA/MA/SMK	85,55%	90,79%	95,68%	87,21%	90,03%	90,87%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah



Tabel 4.7.

Angka Partisipasi Murni Tahun 2013 menurut Kecamatan

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7 - 12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7 - 12 th	APM (%)	Jumlah siswa usia 13 - 15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 7 - 12 th	APM (%)	Jumlah siswa usia 16 - 19 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 7 - 12 th	APM (%)
1.	RasanaE Barat	4.086			2152			2749		
2.	RasanaE Timur	1.805			894			101		
3.	Mpunda	2.599			2121			3044		
4.	Raba	3.938			1175			1648		
5.	Asakota	3.033			792			833		
	Jumlah	15.461	16.715	92,49	7.134	8.162	87,40	8.375	9,302	90,03

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk, kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indicator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memeperhitungkan umur, pada



jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 4.8.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar APK) Tahun 2008 s.d 2013 Kota Bima

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI						
-	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI					18.140	19.945
-	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	16.879	16.517	16.357	17.182	16.715	19.154
-	APK SD/MI					108,53%	104,13%
2.	SMP/MTs						
-	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs					9.333	13.133
-	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	10.068	9.154	8.870	9.161	8.162	7.892
-	APK SMP/MTs					114,35%	166.41%
3.	SMA/MA/SMK						
-	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK					11.623	13.621
-	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun	11.680	12.016	9.043	12.207	9.302	9.572
-	APK SMA/MA/SMK					124,95%	142,31%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa angka partisipasi kasar (APK) di Kota Bima untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat lebih dari 100 persen. Capaian angka ini menunjukkan bahwa semua



penduduk usia sekolah SD dan SLTP di Kota Bima sedang/masih bersekolah dengan kata lain bahwa partisipasi penduduk Kota Bima sampai dengan SLTP/ sederajat sudah baik. Tingginya APK (di atas 100%) diduga masih ada anak-anak umur di atas 12 tahun tetapi masih bersekolah di tingkat SD/Sederajat atau adanya siswa yang lebih muda dari umur standar (dibawah 7 tahun) yang sudah masuk jenjang pendidikan SD/Sederajat. Demikian pula untuk tingkat SLTP.

Sedangkan APK SLTA/Sederajat di bawah 100 persen (87,25%), diduga penduduk usia sekolah SLTA/Sederajat setelah tamat SMP tidak lagi melanjutkan ke tingkat SLTA/Sederajat.

4. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan yang ditamatkan.



Tabel. 4.9

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2008 s.d 2013

No.	APT	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD	97,33%	98,21%	98,10%	100%	96,01%	99,87%
2.	SMP	88,83%	94,34%	97,70%	99,96%	91,43%	99,67%
3.	SMA	94,29%	87,58%	98,40%	98,62%	96,62%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Bappeda Kota Bima, diolah

C. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika ada pertumbuhan ekonomi otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan



sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan definisi tenaga kerja menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh uang/pendapatan atau membantu melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam tidak terputus selama seminggu sebelum pencacahan (wawancara dalam pengumpulan data). Batasan ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya bidang ketenagakerjaan yang membatasi usia minimum seorang pekerja adalah 15 tahun. Penentuan batas usia pensiun atau batas usia kerja maksimal penduduk tidak ditetapkan dalam UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan (batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja-PK, Peraturan Perusahaan-PP/Perjanjian Kerja Bersama-PKB), atau berpedoman pada beberapa UU yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan masa pensiun, seperti UU Jamsostek, UU mengenai Dana Pensiun atau UU Kepegawaian berikut turunannya, serta UU mengenai profesi tertentu. Konsepsi penduduk usia kerja yang digunakan dalam profil



perkembangan kependudukan Kota Bima ini adalah penduduk berumur 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi Bergeraknya roda pembangunan.

Penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan atau disebut penduduk yang aktif secara ekonomi (*Economically Active Population*), sedangkan sisanya yaitu mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (cacat, penerima pendapatan dan lain sebagainya) digolongkan sebagai bukan angkatan kerja (*Non Economically Active Population*). Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun.

Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Tabel 4.10
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Bima Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	TENAGA KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15 – 19	6.743	13,17	6.094	12,39	12.837	12,78
20 – 24	7.635	14,91	7.145	14,52	14.780	14,72
25 – 29	8.025	15,67	7.597	15,44	15.622	15,56
30 – 34	6.857	13,39	7.274	14,78	14.131	14,07
35 – 39	6.113	11,94	6.257	12,72	12.370	12,32



40 – 44	5.168	10,09	5.197	10,56	10.365	10,32
45 – 49	3.905	7,62	3.840	7,81	7.745	7,71
50 – 54	3.607	7,04	3.131	6,36	6.738	6,71
55 – 59	2.044	3,99	1611	3,27	3.655	3,64
60 – 64	1.118	2,18	1053	2,14	2.171	2,16
TOTAL	51.215	51,00	49.199	49,00	100.414	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Jumlah dan proporsi tenaga kerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin Kota Bima ditunjukkan pada tabel 4.10. Dari tabel 4.10 terlihat bahwa proporsi tenaga kerja tertinggi berada pada kelompok umur 25-29 tahun. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase tenaga kerja laki-laki lebih tinggi (51,00%) dibandingkan tenaga kerja perempuan (49,00%). Proporsi tenaga kerja laki-laki tertinggi berada pada kelompok umur 25-29 tahun, begitu pula dengan proporsi tenaga kerja perempuan. Dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi pula.



Tabel 4.11
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Bima,
Tahun 2013

Kelompok Umur	Tenaga Kerja				Jumlah Penduduk				% Tenaga Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	L + P		Laki-laki	Perempuan	L + P		Laki-Laki	Perempuan	L + P
			n	%			n	%			
15 - 19	6.743	6.094	12.837	12,78	6.925	6.561	13.486	11,47	102,34	92,88	97,74
20 - 24	7.635	7.145	14.780	14,72	7.839	7.818	15.657	13,32	97,4	91,39	94,4
25 - 29	8.025	7.597	15.622	15,56	8.337	8.552	16.889	14,37	96,25	88,84	92,5
30 - 34	6.857	7.274	14.131	14,07	7.900	8.334	16.234	13,81	86,79	87,28	87,04
35 - 39	6.113	6.257	12.370	12,32	6.843	7.240	14.083	11,98	89,33	86,43	87,84
40 - 44	5.168	5.197	10.365	10,32	5.873	6.089	11.962	10,18	87,99	85,36	86,65
45 - 49	3.905	3.840	7.745	7,71	4.878	5.350	10.228	8,70	80,05	71,77	75,72
50 - 54	3.607	3.131	6.738	6,71	4.030	4.079	8.109	6,90	89,51	76,76	83,1
55 - 59	2.044	1611	3.655	3,64	3.044	3.228	6.272	5,34	67,13	18,92	42,32
60 - 64	1.118	1053	2.171	2,16	2.330	2.294	4.624	3,93	47,96	23,12	35,64
TOTAL	51.215	49.199	100.414	100,00	57.999	59.545	117.544	100,00	88,89	80,07	84,42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Dari tabel 4.11 di atas terlihat bahwa 84,42 persen dari jumlah penduduk Kota Bima merupakan penduduk usia kerja yang berpotensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi Bergeraknya roda pembangunan, dimana 88,89 persen merupakan tenaga kerja laki-laki dan 80,07 persen tenaga kerja perempuan.

Kualitas sumberdaya manusia salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Jika tenaga kerja mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, maka akan meningkatkan pendapatannya. Disamping dapat meningkatkan pendapatannya, pendidikan baik formal maupun non formal juga akan menambah atau meningkatkan keahlian atau kemahiran tenaga kerja dalam bidang tertentu.

Tabel 4.12

Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Bima Tahun 2013

PENDIDIKAN	TENAGA KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	1.040	2,03	1.993	4,05	3.033	3,02
Belum Tamat SD/Sederajat	3.504	6,84	4.578	9,31	8.082	8,05
Tamat SD/Sederajat	7.712	15,06	7.677	15,60	15.389	15,33
SLTP/Sederajat	8.782	17,15	8.493	17,26	17.275	17,20
SLTA/Sederajat	23.481	45,85	20.056	40,77	43.538	43,36
Diploma II	496	0,97	955	1,94	1.451	1,44
Akademi/Diploma III/SARMUD	708	1,38	1.076	2,19	1.783	1,78
Diploma IV/Strata I	5.162	10,08	4.240	8,62	9.402	9,36
Strata II	318	0,62	130	0,26	448	0,45
Strata III	12	0,02	2	0,00	14	0,01
TOTAL	51.215	51,00	49.199	49,00	100.414	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Tabel 4.12 di atas memperlihatkan bahwa hampir setengah (43,36%) tenaga kerja di Kota Bima berpendidikan SLTA/ sederajat, diikuti berpendidikan SLTP/ sederajat (17,20%), Tamat SD/ Sederajat (15,33%), Diploma IV/ Strata I (9,36%), Belum tamat SD/ Sederajat (8,05%), Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda (1,75%), Diploma II (1,44%), Strata II (0,45%), Strata III (0,01%). Namun masih ada 3,02% tenaga kerja yang tidak/ belum sekolah.

2. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Secara struktural angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam



angkatan kerja. Penduduk usia kerja atau biasa disebut tenaga kerja (manpower) dipilah kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja (bukan termasuk angkatan kerja) ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Misalnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan.

Dari tabel 4.13 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Bima cukup besar yakni 71.234 orang atau lebih dari separuh (62,89%) jumlah tenaga kerja atau lebih dari separuh jumlah tenaga kerja berpartisipasi dalam pasar kerja, baik bekerja ataupun yang belum/tidak bekerja (pengangguran). Lebih dari setengah (57,38%) dari jumlah angkatan kerja adalah laki-laki dan hampir setengahnya (42,62%) adalah angkatan kerja perempuan. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 4.13

Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Bima, Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA						TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUM LAH
15 - 19	6.615	16,04	5.244	17,12	11.859	16,50	98,10	86,05	92,38
20 - 24	7.049	17,09	5.030	16,42	12.079	16,81	92,32	70,40	81,72
25 - 29	6.013	14,58	4.276	13,96	10.289	14,31	74,92	56,29	65,86
30 - 34	5.131	12,44	3.998	13,05	9.128	12,70	74,82	54,96	64,60
35 - 39	4.578	11,10	3.679	12,01	8.257	11,49	74,89	58,79	66,75
40 - 44	3.868	9,38	2.747	8,97	6.616	9,20	74,85	52,87	63,83
45 - 49	2.924	7,09	2.561	8,36	5.485	7,63	74,88	66,69	70,82
50 - 54	2.701	6,55	1.660	5,42	4.361	6,07	74,88	53,01	64,72
55 - 59	1.530	3,71	799	2,61	2.329	3,24	74,83	49,60	63,71
60 - 64	836	2,03	636,68	2,08	1.473	2,05	74,82	60,46	67,85
TOTAL	41.244	57,38	30.630	42,62	71.874	100	80,53	62,26	71,58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Tabel 4.13 juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja perempuan (80,53% dan 62,26%), hal ini diduga bahwa perempuan lebih banyak yang menjadi ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga.

Selanjutnya angkatan kerja yang bekerja atau seseorang melakukan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau membantu menghasilkan upah, gaji, pendapatan atau penghasilan atau didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan yang menghasilkan nilai tambah sehingga diperhitungkan dalam penghitungan sistem neraca nasional



Tabel 4.14

Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja, Angka Penyerapan Angkatan Kerja, Kota Bima, Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA			TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15 - 19	6.198	4.825	11.023	93,70	92,01	92,95
20 - 24	6.681	4.723	11.404	94,78	93,89	94,41
25 - 29	5.865	3.981	9.846	97,55	93,10	95,70
30 - 34	4.792	3.783	8.575	93,40	94,63	93,94
35 - 39	4.298	3.454	7.752	93,89	93,89	93,89
40 - 44	3.632	2.580	6.212	93,89	93,89	93,89
45 - 49	2.745	2.404	5.150	93,89	93,89	93,89
50 - 54	2.536	1.558	4.094	93,89	93,89	93,89
55 - 59	1.436	750,197	2.186	93,89	93,89	93,89
60 - 64	785	597,79	1.383	93,89	93,89	93,89
TOTAL	38.968	28.656	67.624	94,48	93,56	94,09

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Dari tabel 4.14 terlihat bahwa angkatan kerja yang bekerja tertinggi berada pada kelompok umur 25-29 tahun. Untuk angkatan kerja perempuan yang bekerja tertinggi berada pada kelompok umur 15-49 tahun, sedangkan untuk angkatan kerja laki-laki berada pada kelompok 20-24 tahun.

Penyerapan angkatan kerja atau persentase angkatan kerja yang bekerja di Kota Bima cukup tinggi (94,09%) ini membuktikan bahwa pemerintah kota Bima menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja. Penyerapan angkatan kerja tertinggi pada kelompok umur 25-29 tahun. Penyerapan angkatan kerja laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan.



Penyerapan angkatan kerja laki-laki tertinggi pada kelompok umur 25-29 tahun dan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun. Penyerapan angkatan kerja perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun cukup tinggi lebih dari tiga perempat (93,89%) angkatan kerja perempuan bekerja. Secara keseluruhan penyerapan angkatan kerja kelompok umur 25-29 cukup tinggi yakni 95,70 persen.

Tabel 4.15

Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Bima tahun 2013

PENDIDIKAN	TENAGA KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	823	2,00	993	3,24	1.816	2,53
Belum Tamat SD/Sederajat	1.344	3,26	1.578	5,15	2.922	4,07
Tamat SD/Sederajat	5.219	12,65	3.674	11,99	8.893	12,37
SLTP/Sederajat	6.587	15,97	4.493	14,67	11.080	15,42
SLTA/Sederajat	20.987	50,88	14.525	47,42	35.512	49,41
Diploma II	496	1,20	955	3,12	1.451	2,02
Akademi/Diploma III/SARMUD	708	1,72	897	2,93	1.605	2,23
Diploma IV/Strata I	4.754	11,53	3.401	11,10	8.155	11,35
Strata II	314	0,76	112	0,37	426	0,59
Strata III	12	0,03	2	0,01	14	0,02
TOTAL	41.244	57,38	30.630	42,62	71.874	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah

Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Jika angkatan kerja dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Kualitas sumberdaya manusia salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu wilayah, khususnya dalam pembangunan sosial. Semakin banyak penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan pertumbuhan



pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi akan semakin meningkat pula.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya tenaga kerja di Kota Bima termasuk cukup berpendidikan. Sepertiga (49,41%) angkatan kerja Kota Bima berpendidikan SLTA/Sederajat, diikuti dengan tenaga kerja yang berpendidikan SLTP/ sederajat (15,42%) berpendidikan tamat SD/ sederajat 12,37%, pendidikan S1/Diploma IV sebanyak 11,35%, belum tamat SD/ sederajat (4,07%), tidak/ belum sekolah sebesar 2,53%, Diploma III/Akademi/Sarjana Muda sebanyak 2,23%, dan Diploma I/II (2,02%) serta Strata 2 dan Strata III sebanyak 0,61%.

3. Pengangguran (Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja) dan Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja atau terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja dengan kata lain tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga



kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Tingkat pengangguran mempunyai beberapa karakteristik yakni pengangguran menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, menurut pendidikan yang ditamatkan, dan menurut wilayah kecamatan.

Tabel 4.16

Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja, Angka Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Bima, Tahun 2013

KELOMPOK UMUR	ANGKATAN KERJA YANG BELUM/ TIDAK BEKERJA			ANGKA PENGANGGURAN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15 - 19	417	419	836	6,30	7,99	7,05
20 - 24	368	307	675	5,22	6,11	5,59
25 - 29	148	295	443	2,45	6,90	4,30
30 - 34	339	215	553	6,60	5,37	6,06
35 - 39	280	225	505	6,11	6,11	6,11
40 - 44	237	168	404	6,11	6,11	6,11
45 - 49	179	156	335	6,11	6,11	6,11
50 - 54	165	101	267	6,11	6,11	6,11
55 - 59	94	48	142	6,11	6,01	6,08
60 - 64	51	39	90	6,11	6,13	6,12
TOTAL	2.276	1.973	4.249	5,52	6,44	5,91

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah
Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah**

Tabel 4.16. menunjukkan angkatan kerja yang belum/tidak bekerja (penganggur) dan tingkat penganggur menurut umur. Dari 71.874 orang angkatan kerja di Kota Bima, 4.249 orang (5,91%) adalah pengangguran. Secara umum, komposisi penganggur terbuka selama tahun 2012 didominasi oleh golongan umur muda, yakni umur 15-34 tahun. Di antara kelompok umur tersebut, golongan 20-24



tahun adalah yang paling besar jumlahnya yakni 2.506 orang (58,99%).

Saat ini pengangguran usia muda (15-24 tahun) di Kota Bima mencapai 35,55 persen. Persentase pengangguran usia muda ini cukup tinggi dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Bima untuk membina agar mereka dapat bersaing di pasar kerja. Hal yang perlu diperhatikan pemerintah Kota Bima adalah bahwa angka pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti memberikan bekal ketrampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Latar belakang mengapa kelompok usia muda itu ikut terjun ke pasar kerja, antara lain diduga kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia kerja. Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut terjebak dalam kelompok pengangguran, sehingga menambah akumulasi jumlah penganggur menjadi lebih banyak lagi.

Jika pengangguran dikaitkan dengan jenis kelamin, dari tabel 4.17 terlihat bahwa jumlah pengangguran laki-laki lebih tinggi dari



pada Perempuan yaitu 2.276 orang (53,56%) laki-laki dan 1.975 orang (46,44%) perempuan, hal ini disebabkan jumlah angkatan kerja laki-laki memang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 4.17.

Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja, Angka Pengangguran menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Bima Tahun 2013

TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKATAN KERJA YANG BELUM/TIDAKKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	231	10,15	342	8,05	573	8,78
Belum Tamat SD/Sederajat	273	11,99	401	9,44	674	10,33
Tamat SD/Sederajat	335	14,72	489	11,51	824	12,63
SLTP/Sederajat	367	16,12	505	11,89	872	13,36
SLTA/Sederajat	740	32,51	1.846	43,45	2.586	39,63
Diploma II	52	2,28	191	4,50	243	3,72
Akademi/Diploma III/SARMUD	121	5,32	237	5,58	358	5,49
Diploma IV/Strata I	156	6,85	232	5,46	388	5,95
Strata II	1	0,04	6	0,14	7	0,11
Strata III	-	-	-	0	-	0,00
Jumlah	2.276	34,88	4.249	65,12	6.525	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Selanjutnya jika angkatan kerja yang belum/tidak bekerja ini dikaitkan dengan pendidikan yang ditamatkan, maka terlihat bahwa angkatan kerja yang belum/tidak bekerja (menganggur) di Kota Bima sepertiga (39,63%) berpendidikan SLTA/ sederajat, SLTP 13,36%, SD 12,63%. Sementara itu, angkatan kerja yang belum/tidak bekerja yang berpendidikan Strata I/Diploma IV juga cukup tinggi yakni 5,95%, Diploma III/Akademi 5,49%, Diploma II 3,72 %, Strata II sebesar 0,11%.



D. Sosial

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Penyandang masalah kesejahteraan sosial melanda hampir seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar, termasuk di Kota Bima.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dari Tabel 4.17 dan di bawah ini menunjukkan bahwa PMKS terbesar adalah PMKS lain 99,10%, disusul kemudian pemulung 0,30%, waria 0,21%, lepra/kusta 0,16%, pengemis 0,14%, serta WTS 0,10%.



Tabel 4.17

Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Tahun 2013 di Kota Bima

NO.	JENIS PMKS	JUMLAH	PROSENTASE
1	Anak Jalanan	-	-
2	Pengamen	-	-
3	Asongan	-	-
4	Joki Three in one	-	-
5	Parkir liar/P Ogah	-	-
6	Gelandangan	-	-
7	Pengemis	42	0,15
8	Waria	60	0,21
9	WTS	25	0,09
10	Gigolo/Gay/Kucing/PTS	-	-
11	Psikotik	-	-
12	Pengedar Kotak Amal	-	-
13	Lepra/Kusta	43	0,15
14	Kuli Sindang	-	-
15	Pemulung	89	0,31
16	Anak Punk	-	-
17	PMKS Lain	28.476	99,10
	JUMLAH	28.735	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, diolah Dinas Sosial & Tenaga Kerja, diolah

Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya adalah penyandang cacat. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada



kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

2. Penduduk Miskin

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 4.19 di bawah terlihat bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk) yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bima pada Tahun 2011 turun sebesar 0,21 persen yakni sebesar 18.146 (12,60 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Tahun 2010 yang berjumlah 18,264 (12,81 persen). Sedangkan pada Tahun 2012 juga terjadi penurunan sebesar 0,25 persen yakni sebesar



18,069 (12,35 persen) dibanding Tahun 2011. Hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Bima setiap tahun semakin menurun, ini berarti bahwa Pemerintah Kota Bima mampu menaggulangi tingkat kemiskinan walaupun secara bertahap.

Tabel 4.19.

**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk,
Kota Bima Tahun 2010 s/d 2013**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk miskin	persentase penduduk miskin
	Kota	Desa	Kota + Desa		
2010	256.552	202.096	224.912	18.264	12,81
2011	259.827	206.323	228.659	18.146	12,6
2012	257.779	215.743	233.283	18.069	12,35
2013	258.758	218.687	235.269	18.012	11,49

Sumber : Bappeda Kota Bima

Garis Kemiskinan (GK) tahun 2010 sebesar Rp 224.912 per kapita per bulan dan lebih tinggi di banding garis kemiskinan Tahun 2011 yang sebesar Rp 228.659 per kapita perbulan atau meningkat 7,56 persen, sedangkan garis kemiskinan tahun 2012 . sebesar Rp. 233.283 atau meningkat 1,00 persen. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2010 adalah 2,46 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,69. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2011 adalah 5,06 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,63, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2012 adalah 2,33 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,62, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2013 adalah 2,24 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,61.



Perkembangan kondisi kemiskinan di Kota Bima tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut ini.

Tabel 4.20.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bima Tahun 2013

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Jumlah Penduduk Miskin	18.264	18.146	18.069	18.069
Persentase Penduduk Miskin (P0)	12,81	12,6	12,35	12,35
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	224.912	228.659	233.283	235.269
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,46	5,06	2,33	2,24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,69	0,63	0,62	0,61

Sumber : Bappeda Kota Bima



BAB V

MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi (Mobilitas Permanen)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Atau dengan kata lain, migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya. Todaro, mengatakan bahwa migrasi lebih banyak disebabkan oleh factor ekonomi.

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi . sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat kabupaten/kota. kecamatan maupun desa/kelurahan.



Tabel 5.1.

Jumlah Migrasi Masuk, Jumlah Migrasi Keluar, Angka Migrasi Masuk, Angka Migrasi Keluar, dan Angka Migrasi Neto menurut Kecamatan, Kota Bima, Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH MIGRASI MSUK			MIGRASI KELUAR	MIGRASI MASUK (INMIGRATION / MI)	MIGRASI KELUAR (OUT MIGRATIO N/ M0)	MIGRASI NETTO (NET MIGRATI ON/ Mn)
	L	P	L + P				
RASANA E BARAT	504	585	1.089	1.323	3,26	3,96	-0,70
RASANA E TIMUR	239	211	450	557	2,48	3,07	-0,59
ASAKOTA	467	510	977	901	3,12	2,88	0,24
RABA	669	722	1.391	1.369	3,58	3,52	0,06
MPUNDA	561	585	1.146	990	3,60	3,11	0,49
KOTA BIMA	2.440	2.613	5.053	5.140	3,29	3,35	-0,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Migrasi penduduk keluar Kota Bima (pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang tahun 2013 adalah 5.140 orang. Jika diperhatikan menurut wilayah Kecamatan maka penduduk pindah terbesar di wilayah Kecamatan Raba yaitu 5.140 orang dan diikuti Kecamatan RasanaE Barat yaitu 1.323 orang, diikuti Wilayah Kecamatan Mpunda yaitu 990 orang, diikuti wilayah Kecamatan Asakota yaitu 901 orang, sedangkan yang paling sedikit Kecamatan Rasanae Timur yakni 557 orang.

Keadaan penduduk pendatang atau migrasi penduduk masuk Kota Bima (datang) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang tahun 2013 adalah 5.053 orang yang terdiri dari 2.440 orang laki-laki dan 2.613 orang perempuan. Jika diperhatikan menurut wilayah maka penduduk datang terbesar di wilayah Kecamatan Raba yaitu 1.391 orang yang terdiri dari 669 orang laki-laki dan 722 orang perempuan. Sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah Kecamatan RasanaE Timur yakni 450 orang yang terdiri dari 239 orang laki-laki dan 211 orang perempuan.



Selanjutnya dari tabel 5.1 terlihat bahwa angka migrasi keluar Kota Bima yaitu 3,35, artinya bahwa dari 1.00 orang penduduk Kota Bima terdapat 3 - 4 orang penduduk yang keluar dari wilayah ini. Jika dilihat menurut wilayah, angka tertinggi migrasi keluar di wilayah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 3,96 artinya bahwa dari 1.00 penduduk di wilayah Kecamatan Rasanae Barat terdapat 4 orang yang keluar dari wilayah ini dan angka migrasi keluar terendah di Kecamatan Asakota yaitu 2,88 yakni dari 1.00 penduduk Wilayah Kecamatan Asakota terdapat 2-3 orang penduduk yang keluar dari wilayah ini.

Selanjutnya tabel 5.1. di atas juga menunjukkan angka migrasi masuk ke Kota Bima yakni sebesar 3,29 artinya dari 1.00 penduduk terdapat 3-4 orang pendatang di Kota Bima. Jika dilihat menurut wilayah Kecamatan, wilayah dengan angka migrasi masuk tertinggi adalah Kecamatan Mpunda yaitu 3,60 dimana dalam setiap 1.00 penduduk terdapat 3-4 orang penduduk pendatang (migrasi masuk) di Kecamatan Mpunda dan paling rendah adalah Kecamatan RasanaE Timur yakni 2,48 dimana dalam setiap 100 penduduk terdapat 2-48 pendatang (migrasi masuk di Kecamatan RasanaE Timur

Tabel 5.2.

**Angka Migrasi Masuk, Angka Migrasi Keluar, dan
Angka Migrasi Neto menurut Wilayah Kecamatan , Tahun 2013**

KECAMATAN	ANGKA MIGRASI MSUK			ANGKA MIGRASI KELUAR			ANGKA MIGRASI NETO		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
RASANA E BARAT	1,51	3,23	3,26	2,03	1,93	3,96	-0,52	-0,18	-0,70
RASANA E TIMUR	1,32	0,67	2,48	1,72	1,35	3,07	-0,40	-0,19	-0,59
ASAKOTA	1,49	1,31	3,12	1,30	1,58	2,88	0,19	0,05	0,24
RABA	1,72	2,27	3,58	1,79	1,73	3,52	-0,07	0,13	0,06
MPUNDA	1,76	1,76	3,60	1,62	1,49	3,11	0,14	0,35	0,49
KOTA BIMA	1,59	1,59	3,29	1,70	1,65	3,35	-0,11	0,05	-0,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.



Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Kartu Keluarga menjadi salah satu persyaratan dalam pelayanan publik di Kota Bima, sehingga pada prinsipnya hampir semua keluarga memiliki Kartu Keluarga. Selain itu, adanya program pemberian Nomor Induk Kependudukan Nasional (NIK Nasional), telah mendorong penduduk Kota Bima untuk mengganti dokumen KK yang dimilikinya dengan KK yang Berbasis NIK Nasional. Dari kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak **35.691** atau **83.440%** dengan perincian sebagaimana terlihat dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1.

Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Keluarga yang memiliki KK	Jumlah Keluarga yang belum memiliki KK	Jumlah Kepala Keluarga	Prosentase Kepemilikan KK
RasanaE Barat	8.594	1.356	9.950	86,37
RasanaE Timur	4.865	660	5.525	88,05
Asakota	8.069	999	9.068	88,98
Mpunda	9.626	1.912	11.538	83,43
Raba	7.599	1.242	8.841	85,95
Kota Bima	38.753	6.169	44.922	86,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2013

Jika diperhatikan menurut wilayah Kecamatan, terlihat bahwa wilayah Kecamatan Asakota merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK tertinggi (88,98%) yang diikuti wilayah Kecamatan Rasanae Timur yakni (88.05%),Kecamatan RasanaE Barat (86,37%), Kecamatan



Raba (85.95%) Sedangkan wilayah Kecamatan Mpunda merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK terendah (83.43%).

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan pelayanan publik lainnya di Kota Bima, sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP. Adanya program penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di Kota Bima pada Tahun 2011, mengharuskan semua penduduk wajib KTP di Kota Bima untuk melakukan penyerapan e-KTP, yang meliputi biodata, sidik jari, iris mata, tanda tangan penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bima yang memiliki KTP dan telah melakukan penyerapan/perekaman e-KTP adalah **114.886** jiwa atau **98.26%** sebagaimana terlihat dalam tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP			Jumlah Kepemilikan KTP			Prosentase Kepemilikan KTP		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
RasanaE Barat	25.519	25.526	25.527	6.368	6.278	12.646	24,95	24,59	49,54
RasanaE Timur	13.299	13.305	13.305	2.907	2.604	5.511	21,86	19,57	41,42
Asakota	23.139	23.144	23.148	4.255	3.877	8.132	18,39	16,75	35,13
Mpunda	29.087	29.092	29.093	6.753	6.747	13.500	23,22	23,19	46,40
Raba	23.807	23.812	23.813	6.026	6.099	12.125	25,31	25,61	50,92
Kota Bima	114.851	114.879	114.886	26.309	25.605	51.914	22,91	22,29	45,19

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2013

Tabel 6.2. menunjukkan bahwa prosentase kepemilikan KTP penduduk wajib KTP tertinggi di Kecamatan Raba (50,92%) dan terendah di Kecamatan Asakota (35.13%).



C. Kepemilikan Akta

Akta catatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdampak hukum terhadap status keperdataan seseorang. Oleh karenanya setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting wajib dicatatkan untuk mendapatkan akta catatan sipil sebagai bukti hukum atas peristiwa penting tersebut.

Akta catatan sipil meliputi 5 jenis, yaitu akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, dan akta pengakuan anak. Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi, dll. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusya sebuah perkawinan.

Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F.1.01, khususnya informasi tentang kepemilikan akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan anak, menyebabkan sulitnya memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK. Oleh karenanya dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini hanya menyajikan kepemilikan akta kelahiran bagi yang lahir di tahun 2013.



1. Pencatatan Kelahiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk melaksanakan amanat ini, Pemerintah Kota Bima telah berupaya untuk memberikan pelayanan akta kelahiran kepada masyarakat tanpa dipungut biaya atau bebas biaya

Tabel 6.3.

Jumlah Pencatatan Kelahiran menurut Wilayah Kecamatan Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Penduduk Mencatat Kelahiran Akta Kelahiran		
	L	P	L + P
RasanaE Barat	188	219	407
RasanaE Timur	103	96	199
Asakota	195	169	364
Mpunda	290	260	550
Raba	215	214	429
Kota Bima	991	958	1.949

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2013

Tabel 6.3. di atas menunjukkan bahwa jumlah pencatatan kelahiran tahun 2013 yaitu sebanyak 1.949 jiwa penduduk perempuan sebanyak 958 jiwa dan laki-laki sebanyak 991 jiwa.

2. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan



keajiban yang melekat didalamnya. Data kepemilikan akta perkawinan sebagaimana tabel 6.5 di bawah ini.

Tabel 6.5.
Pencatatan Perkawinan Di Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Pencatatan Perkawinan
RasanaE Barat	5
RasanaE Timur	-
Asakota	2
Mpunda	2
Raba	-
Kota Bima	9

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dari tabel 6.5 terlihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan pencatatan perkawinan tahun 2013 sebanyak 9 jiwa. Hal ini menunjukan bahwa penduduk yang memeluk agama selain islam adalah sangat sedikit sekali yakni 0.01 persen, berarti penduduk Kota Bima mayoritas penganut agama islam.

3. Pencatatan Perceraian

Akta cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Di Kota Bima tidak ada yang mencatat perceraianya selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Ini menandakan bahwa penduduk Kota Bima mayoritas islam sehingga penduduk yang mencatat perceraianya bukan pada Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil tetapi mereka mencatatnya di Pengadilan Agama.



4. Pencatatan Kematian

Administrasi kependudukan bukan saja dibutuhkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), yang masih hidup namun juga berlaku, untuk yang telah meninggal dunia. Fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran. Masyarakat perlu segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian. Karena terkait status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun pribadi. Terlebih beberapa tahun kedepan, akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris (intinya agar mempermudah urusan administrasi, bagi keluarga yang ditinggalkan). Kondisi saat ini, kesadaran masyarakat pembuat akta kematian masih kurang.

Selain akta kematian mempunyai banyak fungsi dengan kaitan persoalan penentuan hukum privat maupun publik, kepemilikan akta kematian jika dikaitkan dengan pelaporan kematian akan mendukung pendataan penduduk yang lebih akurat dari sisi jumlah penduduk. Jika pelaporan kematian ini tidak berjalan dengan benar, maka biodata alm. akan tetap terdaftar dalam database kependudukan, sehingga akan selalu muncul problem mengenai jumlah penduduk yang tidak sesuai antara *defacto* dengan *dejure*.

Tabel 6.6.

Pencatatan Kematian Di Kota Bima Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Penduduk Mencatat Kematian / Akta Kematian		
	L	P	L + P
RasanaE Barat	5	0	5
RasanaE Timur	2	0	2
Asakota	1	0	1
Mpunda	4	7	11
Raba	2	2	4
Kota Bima	14	9	23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima



Dari tabel 6.6 terlihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan pencatatan kematian tahun 2013 sebanyak 23 jiwa dengan perincian laki-laki 14 jiwa dan perempuan 9 jiwa.

KEGUNAAN dari Akta Kematian ini ialah :

- Untuk persyaratan pengurusan | atau suami maupun anak.
- Bagi janda atau duda (t egeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
- Diperlukan untuk mengurus
- Untuk mengurus uang duka, Asuransi dan lain sebagainya.

D. Pengakuan, Pengesahan Dan Pengangkatan Anak Dan Peristiwa Penting Lainnya.

Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Sedangkan pengesahan anak adalah pengesahan status anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan orang tua anak tersebut. Berbeda dengan pengakuan anak dan pengesahan anak yang memperkuat hubungan hukum keperdataan anak dengan orang tua kandungnya, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk **mengalihkan** hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.



BAB VII PENUTUP

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2013 merupakan gambaran perkembangan kependudukan serta capaian/dampak keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bima pada tahun 2013.

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2013 ini adalah data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik yang diproses database kependudukan SIAK maupun manual, serta data kependudukan dari instansi terkait lainnya, seperti BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dikpora.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima ini diharapkan akan bermanfaat menjadi salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan berbagai bidang agar aspiratif terhadap kondisi dan kebutuhan penduduk, juga bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.

Untuk perbaikan penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan komitmen dan dukungan berbagai pihak khususnya SKPD yang berkaitan dengan kependudukan, sehingga Profil Perkembangan Kependudukan tahun mendatang akan lebih baik, lengkap, akurat, dan tepat waktu. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2013 ini masih jauh dari sempurna, namun saya berharap semoga informasi dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini bermanfaat.